

**PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAH  
DAERAH DENGAN PENGRAJIN SEPATU SEBAGAI  
PRODUK UNGGULAN DAERAH**

**(Studi pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan  
Kota Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Gelar Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**KHOIRUNNISA' PURNAMASARI  
NIM. 135030101111020**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2017**

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

*(Q.8. Al-Insyirah:5)*



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)

Disusun Oleh : Khoirunnisa Purnamasari

NIM : 135030101111020

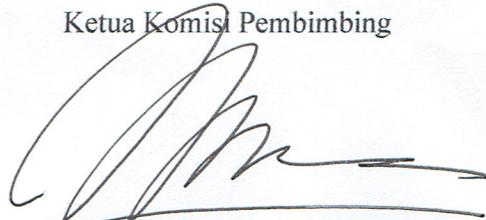
Fakultas : *Ilmu Administrasi*

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 18 Januari 2017

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Mochamad Makmur, MS

NIP. 19511028 198003 1 002

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 7 Maret 2017  
Jam : 08.00-09.00 WIB  
Skripsi Atasnama : Khoirunnisa' Purnamasari  
Judul : Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan Pengrajin Sepatu sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi pada kampung Sepatu di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)

**Dan Dinyatakan LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

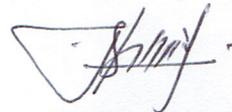
Ketua



Dr. Mochamad Makmur, MS

NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Siswidiyanto, MS

NIP. 19600717 198601 1 002

Anggota



Mochammad Chazienul Ulum, S.Sos,MPA

NIP. 19740614 200501 1001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi yang berjudul **“Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini di gugurkan dengan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 13 Januari 2017



Khoirunnisa' Purnamasari

NIM. 135030101111020

## RINGKASAN

Purnamasari, Khoirunnisa', 2017. **Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)**. Komisi Pembimbing: Dr. Mochamad Makmur, MS.

---

Pengembangan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dengan pengrajin sepatu dengan berbagai bentuk, yang bertujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pengembangan pemberdayaan ini juga bertujuan untuk mengarahkan, melatih dan membantu kebutuhan pengrajin agar meningkatkan kualitas produksi sepatu menjadi produk unggulan daerah Kota Mojokerto. Kerajinan sepatu yang terdapat di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto merupakan salah satu tempat pengrajin sepatu yang cukup banyak. Sehingga diperlukan adanya pengembangan pemberdayaan untuk mengembangkan kerajinan sepatu agar menjadi produk unggulan daerah Kota Mojokerto.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh 2 (dua) fokus penelitian yaitu (1) pengembangan pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di kampung sepatu kelurahan miji kecamatan kranggan Kota Mojokerto (2) faktor pendukung dan penghambat pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di kampung sepatu kelurahan miji kecamatan kranggan kota mojokerto. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah melalui peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, pemberian pengaturan dan pengendalian usaha. Pengembangan pemberdayaan ini didukung banyaknya tenaga kerja dan merupakan salah satu akses menuju Kota Mojokerto untuk menarik daya wisata. Hambatan dalam pengembangan pemberdayaan ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya modal dan masih belum adanya tempat pemasaran. Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah melakukan beberapa pembenahan agar dapat mengembangkan usahanya dan menjadikan sepatu sebagai produk unggulan daerah Kota Mojokerto seperti mengadakan pelatihan, pameran dan memberikan modal.

**Kata Kunci:** Pengembangan Pemberdayaan, Kerajinan Sepatu

## SUMMARY

Purnamasari, Khoirunnisa', 2017. **“Empowerment of Local Government Development With Custom Shoes As Regional Superior Product (Studies at Shoes Kampung In Kelurahan Miji Kranggan Subdistrict of Mojokerto).”**.  
Dr. Mochamad Makmur, MS.

---

Developing empowerment by the Local Government through the Agency of Industry and Trade Cooperative craftsman Mojokerto with shoes of various shapes, which is aimed at the welfare of people's lives better. Empowerment development also aims to orient and train and assist the needs of artisans in order to improve production quality shoe becomes superior product Mojokerto. Craft shoes that are in Kampung Village Shoes Miji Mojokerto is one of the craftsmen shoes quite a lot. So necessary to the development of empowerment to develop the craft shoes to be a superior product in Mojokerto.

This research is descriptive qualitative approach and is bounded by two (2) focus of research: (1) the development of empowerment of Local Government with craftsmen shoes as a superior product in the hometown of shoes villages Miji districts Kranggan Mojokerto (2) that factor supporting and inhibiting the development of empowerment local governments with craftsmen shoes as a superior product at shoes kampung in kelurahan miji kranggan subdistricts of mojokerto. Analysis of the data used is data analysis interactive model of Miles, Huberman and Saldana with the data collection phase, data reduction, data presentation and conclusion.

Based on the results showed that the development of the empowerment of Local Governments with craftsmen shoes as a superior product by improving the financial, marketing development, human resource development, provision of the regulation and control efforts. This empowerment supported many development workers and is one of the accesses to Mojokerto to draw travel. Bottleneck in the development of this empowerment is the low quality of human resources, limited capital and yet their marketing venues. Suggestions from this study is the regional government made some improvements in order to develop their business and make the shoes as a superior product Mojokerto such as training, exhibitions and provide capital.

**Keywords:** Development Of Empowerment, Craft Shoes

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Keluarga tercinta, Ayah Sukistiyono, Almrhm. Ibu Sutrami, Evi Rakhmawati dan Erni Kurniawati yang selalu memberikan dukungan, perhatian, kebahagiaan, motivasi serta doanya yang selalu tulus sepanjang waktu.
6. Seluruh pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Kelurahan Miji, terutama Kepala Bagian Perindustrian Ibu Siti Nurjannah,

Kepala seksi Bina UKM Ibu Ade Retno Setyawati yang selama ini sangat membantu peneliti untuk memperoleh data dalam proses penelitian.

7. Sahabat penulis Eka Yulinda, Niken Mukti Intan Permatasari, Muhammad Hanung Annanta, Taufiq Budi Darmawan dan untuk teman seperjuangan Lintang Rasyida Dwi Permatasari, Deny Latifah, Fadillah Wardiyana Warjan dan Alien Bega Hardian yang telah memberi dukungan dan motivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Untuk Akhmad Fahrur Rozi terimakasih sudah menemani, memberikan semangat, motivasi, dan mendoakan penulis kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karenanya demi kesempurnaan karya ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan keilmuan dan bagi kemajuan Indonesia.

Malang, 13 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi .....	11
1. Administrasi Publik.....	11
2. Administrasi Pembangunan.....	12
B. Pemberdayaan .....	13
1. Pengertian Pemberdayaan .....	13
2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan.....	16
3. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pemberdayaan UMKM.....	17
C. Pemerintah Daerah .....	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	20
2. Hak dan Kewajiban Pemerintah.....	21
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	23
2. Kriteria Usaha Kecil Menengah.....	25
3. Fungsi dan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian .....	29
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	31
D. Jenis dan Sumber Data .....	32



E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Analisis Data.....	38
H. Keabsahan data.....	41

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum.....	45
1. Gambaran Umum Kota Mojokerto.....	45
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.....	53
3. Gambaran Umum Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.....	56
4. Gambaran Umum Kampung Sepatu.....	58
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	60
1. Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.....	60
a. Peningkatan Kemampuan Finansial.....	61
b. Pengembangan Pemasaran.....	64
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	67
d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha.....	69
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.....	73
a. Faktor Pendukung.....	73
b. Faktor Penghambat.....	76
C. Pembahasan.....	79
1. Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.....	79
a. Peningkatan Kemampuan Finansial.....	81
b. Pengembangan Pemasaran.....	84
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	86
d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha.....	89
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.....	93
a. Faktor Pendukung.....	93
b. Faktor Penghambat.....	95

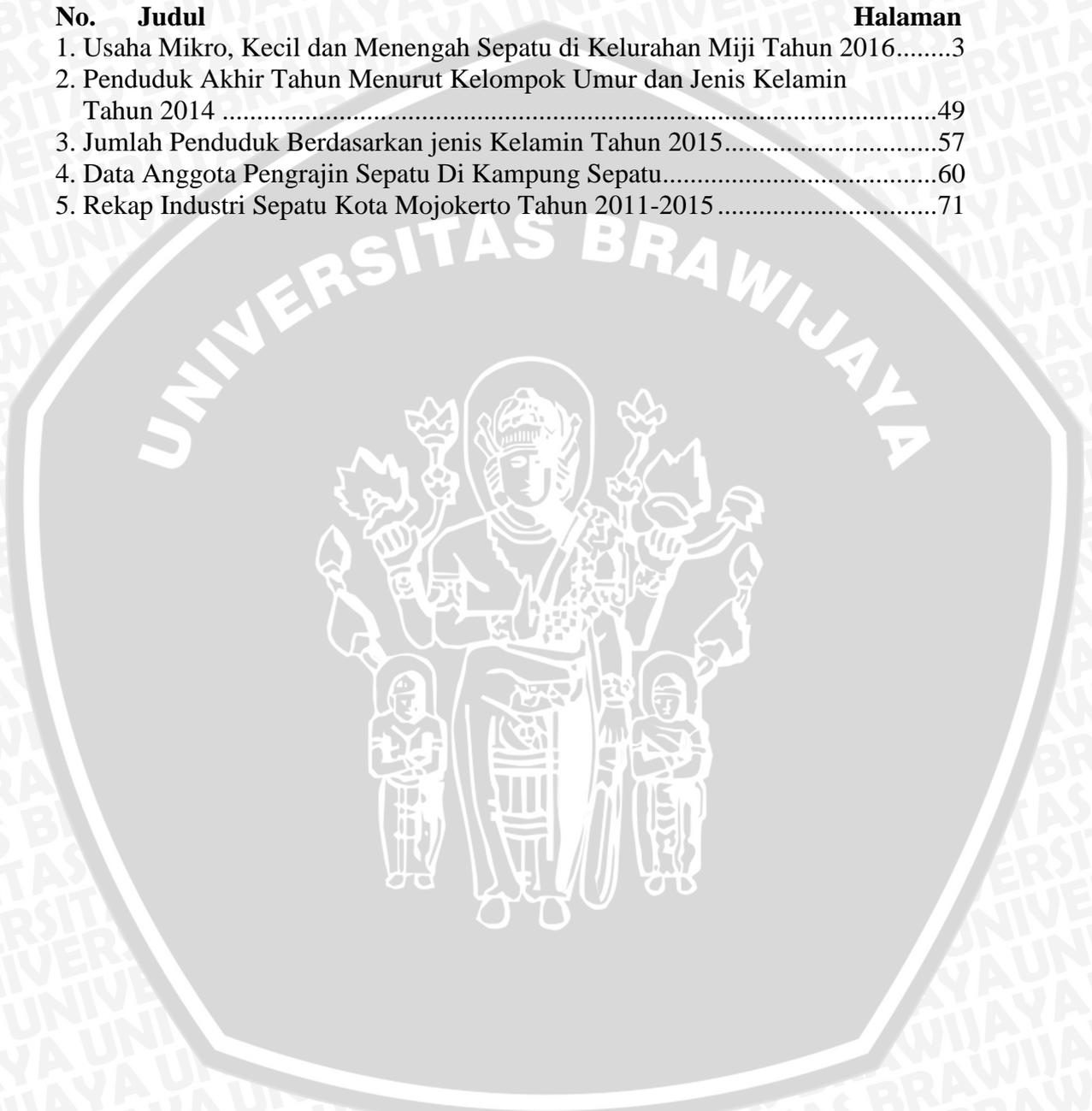
#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sepatu di Kelurahan Miji Tahun 2016.....	3
2.	Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 .....	49
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2015.....	57
4.	Data Anggota Pengrajin Sepatu Di Kampung Sepatu.....	60
5.	Rekap Industri Sepatu Kota Mojokerto Tahun 2011-2015 .....	71



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana Tahun 2014.....	38
2.	Lambang Kota Mojokerto.....	46
3.	Peta Kota Mojokerto.....	48
4.	Pameran Gelar Kriya.....	66
5.	Gedung Workshop.....	68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang besar dalam menekankan pentingnya pemberdayaan dan inisiatif rakyat sebagai inti dari sumber daya pembangunan. Indonesia menunjukkan UMKM sebagai peranan yang vital dan strategis dalam pembangunan perekonomian dalam negeri. Indonesia mempunyai sektor ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh usaha mikro kecil dan menengah ini terbukti bahwa kontribusi yang cukup besar bagi kenaikan pendapatan serta kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar (Rokhayati, 2015:94). Berkaitan dengan perkembangan UMKM masih belum menjalankan fungsi dan peranannya secara maksimal karena menghadapi berbagai kendala seperti masalah keterbatasan modal, teknik produksi, bahan baku, pemasaran dan teknologi. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan dalam mengakses informasi pasar, keterbatasan jangkauan pasar, keterbatasan jaringan kerja, dan keterbatasan mengakses lokasi usaha yang strategis dalam (Fitanto, 2009:24).

Permasalahan dalam menumbuhkembangkan UMKM di Indonesia dapat diminimalisir dengan penguatan peran pemerintah yang dapat ditunjukkan melalui kebijakan serta upaya-upaya atau dukungan untuk mendukung tumbuh kembang UMKM. Salah satunya adalah mengoptimalkan peran lembaga penjaminan sebagai kredit yang diajukan oleh UMKM sehingga UMKM tetap menikmati

kredit perbankan walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh UMKM tidak hanya dari kebijakan pemerintah, namun sinergi sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan UMKM sehingga UMKM mampu menjadi sebagai produk unggulan daerah. Pengembangan pemberdayaan merupakan suatu program penting untuk dilakukan.

Keterbatasan pemerintah tidak hanya pada keterbatasan dana namun juga terletak pada keterbatasan kemampuan. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Salah satu daerah yang memiliki banyak industri kecil menengah dan usaha kecil menengah adalah Kota Mojokerto. Bentuk industri dan usaha yang dijumpai misalnya industri sepatu, tekstil, cor kuningan, makanan, minuman dan lain-lain. Akan tetapi, untuk produk unggulan daerah adalah pada industri kecil menengah sepatu. Karena jumlah pengrajin sepatu di Kota Mojokerto cukup banyak dibandingkan dengan kerajinan jenis lain.

Namun, menurut data UMKM yang diambil dari situs resmi (<http://diskopumkm.jatimprov.go.id/>) oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto menduduki peringkat data UMKM ke 35 dari 38 Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur. Kota Mojokerto memiliki jumlah umkm sebanyak 17.480 dan jumlah tenaga kerja 31.212 orang. Kota Mojokerto menduduki peringkat cukup bawah dibandingkan dengan kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur. Kota Mojokerto mempunyai sentra industri sepatu dimana sebagian besar industri pengolahan bergerak di

bidang alas kaki sandal dan sepatu (Duri, 2013: Vo 1). Sentra industri sepatu yang di Kota Mojokerto diberi nama Kampung Sepatu.

Kampung Sepatu terletak pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Magersari, Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Prajurit Kulon. Produksi sepatu terbesar di Kota Mojokerto terletak pada Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan. Penduduk Kelurahan Miji mempunyai matapencaharian sebagai pengusaha industri sepatu.

**Tabel 1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sepatu di Kelurahan Miji Tahun 2016**

No.	Nama Usaha Dagang	Modal	Tenaga Kerja
1.	UD. Wardana	Rp 50.000.000	28 orang
2.	UD. Farley's	Rp 50.000.000	25 orang
2.	UD. Tri Karya	Rp 25.000.000	20 orang
3.	UD. Perdana	Rp 25.000.000	25 orang

*Sumber: Diolah Oleh Penulis Dari Hasil Wawancara Pengrajin 2016*

Berdasarkan tabel 1, usaha mikro, kecil dan menengah sepatu di kelurahan Miji membutuhkan modal lebih dari Rp 10.000.000 dan memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. Seperti usaha mikro kecil dan menengah UD. Wardana yang membutuhkan modal Rp 50.000.000 dengan tenaga kerja sebanyak 28 orang, sedangkan untuk UD. Tri Karya membutuhkan modal Rp 25.000.000 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang.

Melihat kondisi potensi yang ada maka pengembangan industri kecil menengah dan usaha kecil menengah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Mojokerto yang ada untuk melakukan pengembangan pemberdayaan dengan pengrajin sepatu, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peneliti sebelumnya melakukan pra-penelitian pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan

Perdagangan Kota Mojokerto dan mendapatkan informasi dari Siti Nurjanah Yuniati sebagai Kepala Bidang Perindustrian mengenai pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah. Pemberdayaan yang sudah pernah dilakukan pada industri kecil menengah di Kota Mojokerto khususnya pengrajin sepatu adalah peningkatan kemampuan finansial berupa bantuan dana atau modal, pengembangan pemasaran berupa meningkatkan akses usaha kecil, pengembangan sumber daya manusia berupa memberikan pelatihan dan pemberian pengaturan dan pengendalian usaha berupa peningkatan kemudahan layanan perijinan dan pengutan kelembagaan.

Mengamati pemberdayaan yang terjadi pada usaha mikro kecil dan menengah dan Pemerintah Kota Mojokerto diwakili oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dengan pengrajin sepatu dibutuhkan adanya pengembangan pemberdayaan dalam mewujudkan sebagai produk unggulan daerah. Dalam menjalin sebuah kerjasama atau kemitraan dengan UMKM maupun pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin telah banyak dilakukan akan tetapi hasilnya kurang maksimal. Menurut hasil wawancara dengan Emru Suhadak salah satu pengrajin kerajinan sepatu, produk unggulan Kota Mojokerto dalam kerajinan sepatu masih kalah bersaing dengan daerah-daerah lain khususnya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten

Mojokerto. Menurut pengrajin lain yaitu Muhajir, mengenai modal yang diberikan Pemerintah masih belum mencukupi untuk memproduksi sepatu.

Menyikapi permasalahan tersebut, perlu adanya perhatian dan tindakan dari Pemerintah Daerah Kota Mojokerto diwakili Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan agar pengembangan pemberdayaan antara pemerintah daerah dan pengrajin khususnya kerajinan sepatu di Kota Mojokerto tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah lain dan dapat mewujudkan produksi sepatunya sebagai produk unggulan yang dapat mensejahterakan tenaga kerjanya. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian **“Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Kerajinan Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Kampung Sepatu Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor pendukung dan penghambat pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto.

### D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

#### 1. Kontribusi Akademik

Ilmu administrasi Publik telah mengalami perkembangan yang terusmenerus. Perubahan tersebut terjadi baik pada lokus dan fokus. Perkembangannya terlihat pada perubaan kurikulum dan metode pembelajaran, serta administrasi Publik telah berkontribusi dalam penyelesaian masalah-masalah adminsitrasi Publik yang tengah terjadi, salah satunya adalah menerapkan pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin di Indonesia. Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya

wawasan dalam mendorong kerajinan sepatu agar dapat menjadi produk unggulan daerah. Hasil penelitian ini bagi Fakultas Ilmu Administrasi adalah sebagai bahan referensi untuk membandingkan antara peneliti serupa dengan peneliti yang tertarik untuk mengembangkan tema dan permasalahan yang sama. Hasil penelitian ini bagi Institusi adalah sebagai sarana untuk alih ilmu di bidang administrasi khususnya administrasi publik.

## 2. Kontribusi Praktis

Masukan kepada pemerintah atau instansi, masyarakat, dan peneliti berikutnya agar lebih memahami secara lebih mendalam mengenai Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Mojokerto bisa menjadikan bahan untuk meningkatkan penyempurnaan sarana prasarana penunjang produk unggulan daerah dalam upaya pelayanan prima serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi rencana kerja yang ada agar lebih maksimal lagi. Pemerintah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dapat menjadikan bahan masukan dalam meningkatkan sasaran produk unggulan daerah yang ada agar pengrajin lebih memiliki ide baru dalam desain dan meningkatkan pemasaran sehingga dapat menarik

perhatian masyarakat luar daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan peran actor terkait dalam meningkatkan potensi produk unggulan daerah melalui pengembangan pemberdayaan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai partisipasi mereka agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan produk unggulan daerah seperti kerajinan sepatu.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan respon mahasiswa terhadap pentingnya pengembangan pemberdayaan pemerintah dengan pengrajin untuk meningkatkan potensi produk unggulan daerah, sekaligus untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain sebagai bahan perbandingan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian.

**E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan *pertama*, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan sehingga menarik untuk diteliti. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan Pengrajin Sepatu di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. *Keempat*, adalah kontribusi penelitian secara lebih spesifik. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan konsep dan teori yang menjadi acuan atau landasan dalam penelitian ini, diantaranya pengertian administrasi publik, pengertian administrasi pembangunan, pengertian pemberdayaan, tahapan-tahapan pemberdayaan, peran pemerintah dalam pengembangan pemberdayaan umkm, pengertian pemerintah daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah, pengertian usaha mikro kecil dan menengah, kriteria usaha kecil menengah serta fungsi dan peran usaha mikro kecil dan menengah.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data serta keabsahan data.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi

##### 1. Administrasi Publik

Menurut Syamsiar (2010:95) asal kata Administrasi diartikan yaitu:

“Kata “administrasi” di Indonesia berasal dari kata *administratre* (Latin: *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata, administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada”. Kata administrasi juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Kata *to administer* dapat berarti *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan) ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan.

Sedangkan menurut S.P Siagian (2004:2) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Pasolog (2011:3) administrasi adalah sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa, administrasi adalah proses manajemen yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam

Webster (1996), *public administration* diartikan sebagai: “*branch of political science dealing primarily with the administration of government function*”

Administrasi publik, menurut Candler dan Plano dalam Keban (2004:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan menurut Pasolog (2011:8) mendefinisikan administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah sekelompok orang yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Disini Pemerintah Kota Mojokerto diwakili Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto melakukan pemberdayaan agar kerajinan sepatu dapat menjadi produk unggulan daerah yang dapat dikenal secara luas.

## **2. Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan mencakup 2 (dua) pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Secara umum, administrasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh dua orang

atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pembangunan dalam Suryono (2010:53) secara etimologik, istilah pembangunan diartikan sebagai:

“Pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan *pem-* dan akhiran *-an* guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun mengandung 4 arti yaitu bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi), bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi) dan bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku dan aspek bentuk)

Menurut Siagian (1983) dalam Suryono (2010), pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi pembangunan yaitu keseluruhan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang terencana dalam kehidupan negara untuk mencapai tujuan. Pengembangan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah agar kerajinan sepatu dapat dipasarkan secara luas dan dapat mensejahterakan perekonomian pengrajin dan tenaga kerjanya.

## **B. Pemberdayaan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) mulai muncul sekitar tahun 1970-an, dan terus berkembang sampai dengan tahun 1990-an (atau akhir abad ke 20). Konsep pemberdayaan dipandang sebagai dari

aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran post-modernism. Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang disuatu Negara.

Menurut Friedman (1992), konsep pemberdayaan masyarakat merupakan kegagalan arus utama model pengembangan ekonomi yang berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan lain. Alternatif pembangunan tersebut dipusatkan pada manusia dan lingkungan daripada produksi, laba dan pendekatan pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Model alternatif pembangunan mampu memberdayakan manusia harus didasarkan pada lingkungan kehidupan social dari sudut pandang mikro yaitu aspek kerumah tanggaan. Pemberdayaan masyarakat juga tidak terlepas dari kekuatan masyarakat. Konsep *power* dalam masyarakat adalah variable jumlah. Dengan demikian, konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas adalah konsep pemberdayaan dihubungkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Konsep dasar pemberdayaan masyarakat intinya kekuatan tingkat individu dan social.

Menggunakan konsep lain, World Bank (2001) pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta

kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan,dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 adalah Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah
- b. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.

Pemberdayaan menurut Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan usaha kecil, memandirikan dan pemeratakan pendapatan.

## 2. Tahapan-tahapan Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan menurut Kartasasmita (1996:74) dalam dilakukan melalui 3 arah yaitu:

1. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tokaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah menjadi semakin lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemikiran masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan.

Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, diperlukan adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menciptakan peluang bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi. Menurut Sumodiningrat (1996) dalam Candra (2014) ketiga arah pemberdayaan diatas berpangkal pada 2 sasaran utama yaitu:

1. Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan
2. Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan
3. **Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pemberdayaan UMKM**

Peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah “suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu sebagaimana dikutip dari Cohen (2009:76) dalam Putra (2015:Vol 3). Menurut Miftah Thoha (2003:80), peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pemerintah daerah dalam mengembangkan produk unggulan daerah hendaknya selalu memberikan penghargaan dan perencanaan pembangunan daerah. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dengan demikian banyak yang dapat dilakukan untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.

Menurut Riawan (2005:197) dalam Putra (2015:Vol 3), Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintah daerah dalam hal ini bertindak menyediakan barang dan jasa yang

tidak disediakan oleh swasta seperti jalan raya, keadilan, kemanan dan pemberdayaan usaha kecil menengah. Menurut Gede Diva (2009:15-18) dalam Putra (2015:Vol 3), pengembangan pemberdayaan UMKM merupakan peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator yaitu sebagai berikut:

a) Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Apabila UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Sedangkan apabila UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung.

b) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan

persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c) Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Hal ini dapat diartikan peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalis, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami.

Untuk dapat menjalankan perannya dalam mengembangkan pemberdayaan UMKM sebagai katalisator, pemerintah memberikan bantuan seperti pemodalannya kepada masyarakat. Peran pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya dalam melancarkan program pelatihan dan pendidikan, seperti pelatihan proses produksi sepatu, desain sepatu dan website. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan inovasi, pemasaran dan kerjasama. Pada saat ini pemerintah daerah telah berupaya lebih mengembangkan usaha industri kecil yang bertujuan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.

### C. Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggara umum pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan menurut Hosein dalam Muluk (2007:57) dalam Resita (2015: Vol 3) menyebutkan bahwa *local government* adalah sebuah konsep yang mengandung 3 (tiga) arti.

Pertama, berarti pemerintah lokal yang sering kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni organ dan badan pemerintah. Jadi dalam sebuah rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Jadi dalam pemerintahan lebih mengacu pada fungsi. Ketiga, *local government* bermakna daerah otonom. Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah Daerah disini memiliki peran paling penting untuk meningkatkan potensi daerah yang ada agar dapat menjadi produk unggulan daerah.

## 2. Hak dan Kewajiban Pemerintah

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, terdapat sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 21 menyebutkan bahwa menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai hak antara lain:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih kepala daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 memaparkan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah antara lain:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial budaya

- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hak dan Kewajiban Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah mengatur urusan pemerintahannya dan mensejahterakan masyarakatnya. Hak dan kewajiban pemerintah daerah ini merupakan tanggungjawab untuk meningkatkan potensi daerah salah satunya adalah kerajinan sepatu agar dapat menjadi produk unggulan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola kekayaan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

#### **D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kegiatan usaha yang melibatkan perseorangan atau badan usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Tohar (2002:31) dalam Candra (2014: Vol 2) usaha kecil merupakan usaha untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta

aspek kebijakan. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

## 2. **Kriteria Usaha Kecil Menengah**

Adapun kriteria Usaha Mikro Kecil dan menengah yang dilihat dari segi penghasilan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 pada bab IV pasal 6 dijelaskan kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

### a. **Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:**

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### b. **Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:**

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar ratus juta rupiah).

**c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:**

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Beberapa karakteristik usaha industri kecil lainnya, menurut Tambunan (1999:118-120), yaitu:

1. Proses produksi lebih mekanis dan kegiatannya dilakukan ditempat khusus pabrik yang biasanya berlokasi disamping rumah pengusaha atau pemilik usaha.
2. Sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di industri kecil adalah bayaran.

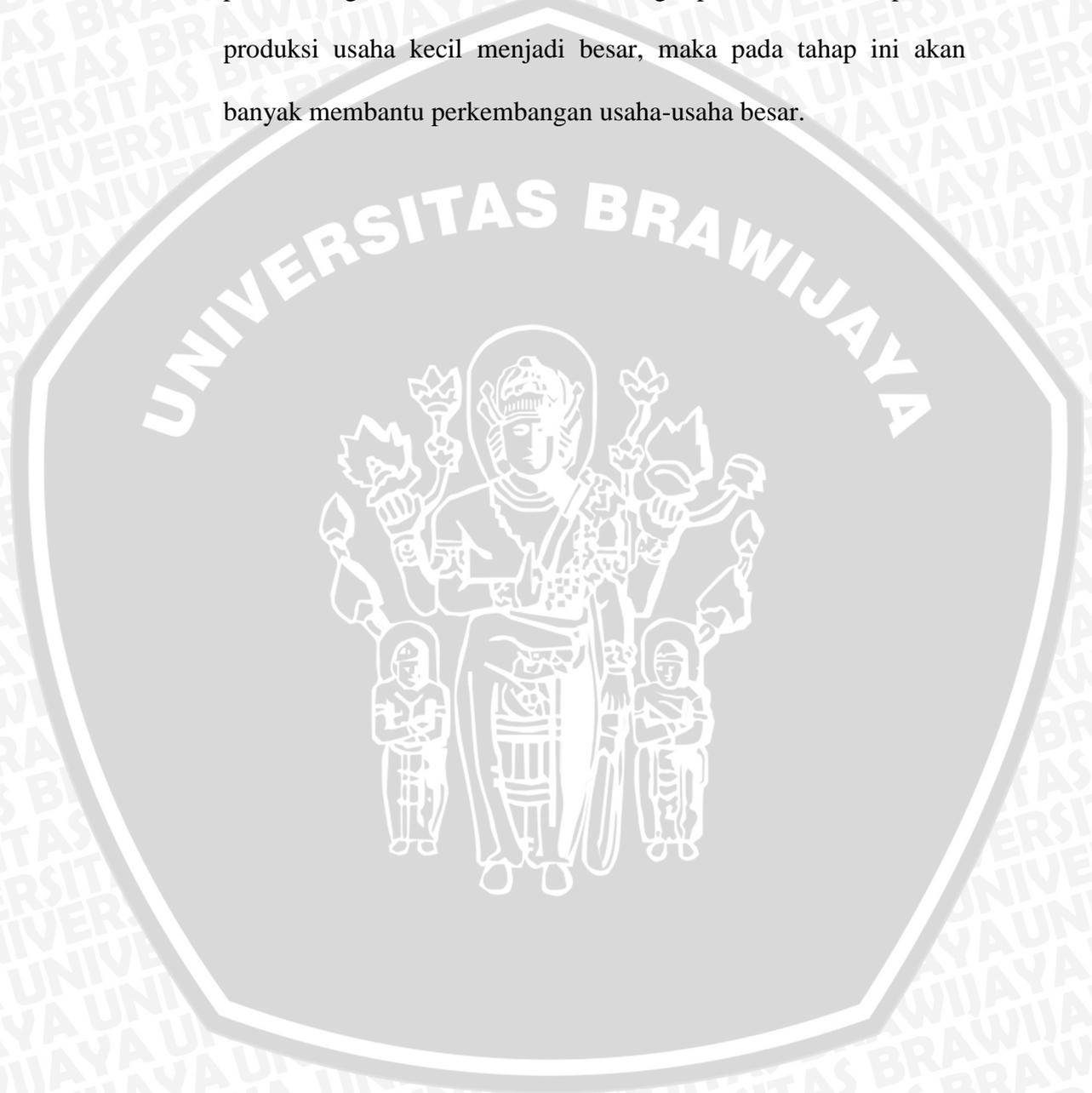
3. Produk yang dibuat termasuk golongan barang-barang yang cukup *Sophisticated* (terkini/mutakhir).
4. Pemilik usaha atau manajer pada usaha kecil, juga mempunyai karakteristik tertentu.

### 3. Fungsi dan Peran Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Tambunan (1999:1) dalam Dedy (2013:Vol 1) mengemukakan bahwa pentingnya usaha kecil khususnya negara berkembang sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial di negara tersebut, seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, jumlah pengangguran yang besar terutama dari golongan masyarakat berpendidikan rendah, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara kota dan daerah pedesaan, masalah urbanisasi dengan segala aspek negatifnya. Jadi kesimpulannya adalah kondisi usaha kecil diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif dalam mengupayakan penanggulangan beberapa masalah yang terjadi. Usaha kecil di Indonesia oleh pemerintah sering dikaitkan dengan upaya untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Usaha kecil adalah salah satu faktor kekuatan ekonomi negara Indonesia. Suatu kesulitan yang dihadapi telah dibantu dan diatasi oleh kehadiran usaha kecil. Sumbangan usaha kecil kepada masyarakat bentuk dan jenis sumbangan yang diberikan tersebut

adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat, menciptakan teknologi dan juga produk baru untuk negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai pemasok. Jika kapasitas produksi usaha kecil menjadi besar, maka pada tahap ini akan banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic* dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2008:6). Penggunaan metode ini untuk dapat mendiskripsikan dan menganalisis tentang pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah di kampung sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penempatan masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor dalam hal ini dapat berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apabila keduanya ditempatkan secara berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanda tanya atau kesulitan (Moleong, 2008:93).

Dengan dasar pemahaman tersebut, maka fokus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto, meliputi:

- a. Peningkatan Kemampuan Finansial berupa pemberian bantuan permodalan
- b. Pengembangan Pemasaran berupa peningkatan akses usaha kecil
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa pemberian pelatihan
- d. Pemberian Pengaturan Dan Pengendalian Usaha, yaitu:
  - 1) Kemudahan layanan perijinan
  - 2) Penguatan kelembagaan

2. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto, meliputi:

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Internal : Tenaga kerja yang cukup banyak
  - 2) Eksternal : Salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto
- b. Faktor Penghambat
  - 1) Internal :
    - a) Rendahnya kualitas sumber daya manusia
    - b) Terbatasnya modal

- 2) Eksternal : Masih belum ada tempat pemasaran (*showroom*)

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebagai keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kota Mojokerto. Adapun pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada aspek kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dilakukan untuk efisiensi waktu. Berdasarkan kenyataan dilapangan dapat diketahui bahwa industri kerajinan sepatu tersebut dapat menyokong perekonomian masyarakat.

Namun dalam perkembangannya pengrajin sepatu masih mengalami kendala dalam hal tingkat permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, pemasaran dan pengembangan desain serta varian produk. Oleh karena itu bentuk-bentuk usaha yang mampu memberikan kontribusi perekonomian ini perlu adanya pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah setempat. Sehingga untuk mengetahui pengembangan pemberdayaan pemerintah dengan pengrajin sepatu maka situs penelitian yang berkaitan adalah di Bidang Perindustrian, Bidang seksi bina UKM, Kantor Pemerintahan Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, dan KOMPAK (Komite Pengusaha Alas Kaki) di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat jenis sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

##### 1. Sumber Data

- a) Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi lain dan bersedia memberikan informasi. Informasi dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel bersifat tidak tentu. Apabila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka sampel yang ada dinyatakan cukup. Dalam penelitian ini informannya adalah Kepala bidang Perindustrian, Kepala bidang seksi bina UKM dan Pengrajin kerajinan sepatu.
- b) Dokumen, yaitu sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis seperti Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 7 Tahun 2009, dokumen serta arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.
- c) Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan dengan sinergi antara pemerintah daerah dengan pengrajin kerajinan sepatu sebagai produk unggulan daerah

## 2. Jenis Data

### a) Data Primer

Sumber data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informasi pada saat dilaksanakannya penelitian.

Sumber data tersebut diperoleh dengan cara pengamatan atau observasi serta wawancara mendalam terhadap informan yang memiliki hubungan langsung dengan obyek. Pihak atau informan yang bersangkutan dalam kaitannya dengan penelitian ini, pihak yang dimaksud antara lain:

- Pelaksana dan Sumber Daya yang dilibatkan dalam Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah dengan Pengrajin Sepatu Kampung Sepatu Kelurahan Miji, antara lain:
  1. Ibu Siti Nurjanah Yuniyati (Kabid Perindustrian di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
  2. Ibu Ade Retno Setyawati (Kabid seksi bina UKM di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)
  3. Bapak Emru Suhadak (Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki)
  4. Bapak Muhajir (pengrajin sepatu)
  5. Bapak Surojudin (pengrajin sepatu)
  6. Bapak Djoko Purnomo (pengrajin sepatu)

### b) Data Sekunder

Data yang akan melengkapi data-data yang diperoleh dari sumber data primer, antara lain berupa dokumen, rekaman media

massa, jurnal dan arsip organisasi yang memiliki kesinambungan dengan obyek yang diteliti. Adapun yang disajikan sumber data sekunder dalam pengembangan pemberdayaan pemerintah dengan pengrajin sepatu ini adalah dokumen Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, laporan-laporan yang mengenai IKM di Kelurahan Miji.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi/Pengamatan**

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2016:145) observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif. Partisipatif pasif dipilih dalam penelitian ini karena peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat

langsung di kampung sepatu kelurahan miji berkaitan dengan pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk memperoleh informasi dan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan masalah penelitian maupun fokus penelitian.

## 2. Pedoman Wawancara (*Interview Guide*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:137) wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yang dimana pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Hal ini peneliti melakukan wawancara dengan lembaga atau organisasi yaitu:

- a) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perindustrian yang terdiri dari Ibu Siti Nurjanah Yuniyati dan Ibu Ade Retno Setyawati selaku penanggungjawab pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu.

- b) Pengrajin sepatu yang terdiri dari Bapak Emru selaku ketua KOMPAK, Bapak Ahmad Muhajir selaku bidang desain KOMPAK, Bapak Surojudin selaku anggota KOMPAK dan Bapak Djoko Purnomo selaku anggota KOMPAK.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang sebagaimana dikutip dari Sugiyono (2016:240). Dalam penelitian ini data yang didapat dari kantor pemerintahan Kelurahan Miji adalah dokumen profil Kelurahan Miji dan data UMKM.

## F. Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2016:223) instrumen penelitian adalah

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. dlaam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam penelitian kualitatif dimana pemasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrument. Instrument yangdigunakan oleh peneliti adalah:

### 1. Peneliti Sendiri

Peneliti sendiri yang dijadikan instrument, karena dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan. Peneliti berperan menjadi objek sekaligus sebagai subjek data penelitian untuk mengetahui pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman dalam melakukan wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada informan untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Fokus dari wawancara ini adalah kepada pegawai bagian perindustrian, pegawai bagian ukm dan pengrajin sepatu kelurahan Miji.

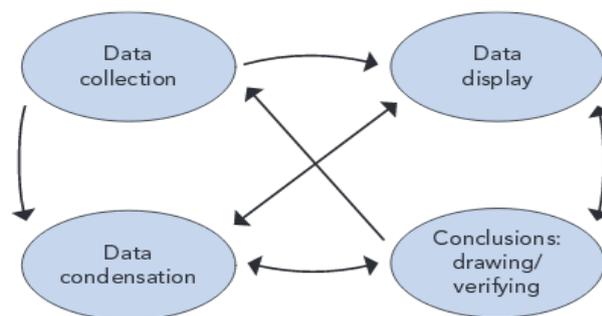
### 3. Catatan Lapangan

Catatan yang dibuat oleh peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau melihat fenomena tertentu dalam lapangan. Catatan lapangan ini, telah peneliti kemas melalui buku catatan untuk dan arsip dari pelaksanaan penelitian di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Dari ketiga instrument diatas akan saling mempengaruhi. Namun peneliti sendiri juga sebagai instrumen yang paling penting. Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### G. Analisis Data

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:244) model interaktif adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Model interaktif Miles dan Huberman antara lain sebagai berikut:



**Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana Tahun 2014**

*Sumber: Miles dan Huberman (Miles, Huberman dan Saldana, 2014: 14)*

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tahap pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada wawancara di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta pengrajin melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Seksi Bina UKM, Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki Dan Pengrajin Sepatu. Pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi bertujuan sebagai bahan penunjang yang memperkuat data-data wawancara yang dibutuhkan untuk penelitian. Peneliti dalam tahap ini melakukan berulang-ulang sehingga data yang dikumpulkan lengkap dan relevan dengan penelitian.

## 2. Reduksi Data (*Data Display*)

Peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan dan yang telah dijelaskan diatas. Dalam wawancara pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan pengrajin melakukan wawancara dengan Kepala bidang Perindustrian, Kepala bidang seksi bina UKM, Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki dan pengrajin kerajinan sepatu serta didukung oleh penyajian data berupa dokumen Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, laporan-laporan yang mengenai IKM di Kelurahan Miji dan data-data yang relevan lainnya untuk menunjang dan memperkuat penyajian data yang disajikan dalam bentuk naratif yang merupakan hasil wawancara dengan para narasumber. Selanjutnya penyajian data di analisis atau pengambilan tindakan lebih jauh yang didasarkan atas pemahaman yang didapat dari

penyajian data yang telah ada, karena dengan hanya menyajikan data akan sulit untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk bisa melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Penyajian Data (*Data Condensation*)

Susunan informasi yang teroganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang telah direduksi peneliti dari fakta dan kejadian dilapangan dari pelaksanaan pengembangan pemberdayaan pemerintah dengan pengrajin sepatu, kemudian peneliti melakukan display dalam bentuk laporan, penyajian data yang bersumber dari situs Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dan lokasi penelitian di Kelurahan Miji kemudan disajikan sesuai format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi sehingga data tersebut dapat dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data ini diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi diintrepetasikan oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga tersaji laporan yang memiliki banyak informasi dan pengetahuan.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verifying*)

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Dalam wawancara pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan pengrajin melakukan wawancara dengan Kepala bidang Perindustrian, Kepala bidang seksi bina

UKM, Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki dan pengrajin sepatu serta dukungan data berupa dokumen Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, laporan-laporan yang mengenai IKM di Kelurahan Miji dan data yang relevan lainnya yang disajikan sedemikian rupa, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dari hasil data yang dikumpulkan dan dianalisa itu dapat ditarik kesimpulan. Kemudian kesimpulan yang telah ditarik, diverifikasikan, baik berdasarkan kerangka pikir penelitian maupun berdasarkan catatan-catatan yang ada, agar mempunyai validitas dan mencapai konsensus pada tingkat optimal antara peneliti dengan sumber informan.

#### **H. Keabsahan data**

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2016:273) *Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures.* Artinya pengecekan data dari berbagai sumber dengan bebrbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2007:270) dalam Khoirunnisaa' (2016:60), uji kebsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *creadibility*

(validitas, interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confrimability* (obyektifitas). Penelitian menggunakan uji *creadibility* (kreadibilitas) serta uji *confirmability* (obyektivitas). Berikut dijelaskan bagaimana peneliti mengadakan uji keabsahan pada proses penelitian:

### 1. Uji Kredibilitas

Beragam-macam cara pengujian kredibilitas data dilakukan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, mengadakan *member check*, dan pengujian *confirmability* untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali melakukan penelitian, melakukan pengamatan terhadap pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu serta wawancara dengan Kepala bidang Perindustrian, Kepala bidang seksi bina UKM, Ketua Komite Pengusaha Alas Kaki dan pengrajin kerajinan sepatu. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh pada saat awal penelitian. Mengingat pada tahap awal peneliti masih dianggap asing oleh informan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sehingga narasumber tidak terlalu terbuka. Untuk itu dalam melakukan pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dalam

hari yang berbeda dalam kurun waktu 1 bulan masa riset. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

## b. Triangulasi

### 1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini dapat diaplikasikan pada saat penelitian tentang Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan Pengrajin Sepatu sebagai Produk Unggulan di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek data yang telah diperoleh melalui Kepala bidang Perindustrian, Kepala bidang seksi bina UKM kemudian peneliti mengecek kembali kebenaran data yang diperoleh melalui narasumber lainnya.

### 2) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada saat waktu yang tepat akan mempengaruhi pemberian data yang lebih valid sehingga lebih terpercaya. Mengingat pada tahap awal peneliti masih dianggap asing oleh informan di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sehingga narasumber tidak

terlalu terbuka. Untuk itu dalam melakukan pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dalam hari yang berbeda dalam kurun waktu 1 bulan masa riset. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

#### c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, hasil wawancara peneliti dengan pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan didukung dengan tulisan peneliti tentang hasil wawancara tersebut.

## 2. Pengujian *confirmability*

Menguji *confirmability* berarti peneliti beserta pembimbing menguji hasil penelitian mengenai Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto. Untuk meningkatkan produk unggulan di Kota Mojokerto yang kemudian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standart *confirmability*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Mojokerto

###### a) Sejarah Kota Mojokerto

Pembentukan Pemerintah Kota Mojokerto melalui suatu proses kesejahteraan yang diawali melalui status sebagai *staadsgemente*, berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda Nomor 324 Tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Pada masa Pemerintahan Penduduk Jepang berstatus *Sidan* diperintah oleh seorang *Si Ku Cho* dari 8 Mei 1942 sampai dengan 15 Agustus 1945. Pada zaman revolusi 1945 - 1950 Pemerintah Kota Mojokerto didalam pelaksanaan Pemerintah menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan diperintah oleh seorang Wakil Walikota disamping Komite Nasional Daerah.

Otonomi Daerah Kota Mojokerto berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, tanggal 14 Agustus 1950 kemudian berubah status sebagai Kota Praja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Mojokerto. Selanjutnya berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974. Selanjutnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto seperti Daerah-Daerah yang lain berubah Nomenklatur menjadi Pemerintah Kota Mojokerto.

b) **Makna Lambang**



**Gambar 2. Lambang Kota Mojokerto**

*Sumber: Diolah dari Situs Resmi Pemerintah Kota Mojokerto 2016*

Lambang Kota Mojokerto ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 26 April 1971 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

- Bentuk Lambang
  1. Daun lambang berbentuk perisai bersudut 5 (lima).
  2. Warna lambang hijau dengan pinggir berwarna kuning emas bergambar padi dan kapas.
  3. Di tengah daun lambang terlukiskan :

gambar pohon MAJA yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3 garis biru yang bergelombang

4. Di bawah daun lambang terdapat gambar pita bertuliskan "Kota Mojokerto"

- **Makna Bentuk dan Warna Lambang**

1. Perisai adalah pertahanan
2. Sudut 5 menggambarkan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia PANCASILA

3. Pinggir berwarna kuning emas dengan gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran

4. Garis biru melambangkan Sungai Brantas yang mengalir di tepi kota dan merupakan salah satu prasarana kemakmuran

5. Warna hijau melambangkan kesejahteraan

6. Pohon MAJA yang berakar 12, berbuah 9 dan bercabang 3 mengandung makna angka tahun 1293 yang mengingatkan akan berdirinya kerajaan Majapahit.

c) **Kondisi Geografis**

Kota Mojokerto merupakan Kota kecil disebelah barat ± 50 km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Timur Surabaya. Kota Mojokerto terletak ditengah-tengah Kabupaten Mojokerto, terhubung pada 7°33 lintang Selatan dan 112°28 Bujur Timur. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata – rata 22 m

diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0 – 3 %.



**Gambar 3. Peta Kota Mojokerto**

Sumber: Diolah dari data Pemerintah Kota Mojokerto 2016

Administrasi Kota Mojokerto berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Timur : Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Puri Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

d) **Kondisi Demografis**

Menurut situs resmi Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto yang diambil dari <https://mojokertokota.bps.go.id> jumlah penduduk Kota Mojokerto dilihat dari Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2014.

**Tabel 2. Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014**

Kelompok Umur	2014		
	Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
0-4	5345	5168	10513
5-9	5690	5550	11240
10-14	6054	5594	11648
15-19	5362	5144	10506
20-24	5110	5109	10219
25-29	5372	5435	10807
30-34	6541	6429	12970
35-39	5923	5705	11628
40-44	5373	5398	10771
45-49	4912	5109	10021
50-54	4030	4503	8533

Kelompok Umur	2014		
	Penduduk Akhir Tahun Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
55-59	3577	3688	7265
60-64	2582	2517	5099
65-69	1362	1701	3063
70-74	1010	1368	2378
75+	1054	1962	3016
Semua Umur	69297	70380	139677

Sumber : Diolah dari Situs Resmi Badan Pusat Statistik 2016

Dari tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki Kota Mojokerto 69.297 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 70.380 jiwa. Dapat dilihat jumlah penduduk yang paling dominan adalah penduduk perempuan yang jumlahnya melebihi 1.083 dari penduduk laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Mojokerto pada lima tahun terakhir adalah 13.9677 jiwa.

Wilayah Kota Mojokerto sebagian penduduk adalah warga asli kota Mojokerto, tidak seperti wilayah-wilayah yang lain yang terdapat warga pendatang, karena mata pencahariannya meliputi petani, pekerja disektor jasa/perdagangan dan pekerja

disektor industri. Dari data kependudukan di atas maka Kota Mojokerto dapat digolongkan kepada Kelas Kota Sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.

e) **Pembagian Wilayah Administratif**

Kota Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan penggunaan dan kondisi lahan yang ada, Mojokerto mengembangkan wilayahnya dalam tiga kecamatan yaitu

1. Kecamatan Magersari
2. Kecamatan Prajurit Kulon
3. Kecamatan Kranggan

f) **Pemerintah Daerah Kota Mojokerto**

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mojokerto mempunyai landasan/Dasar Hukum pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

## 1. Tugas dan Fungsi

Berdasar Perda tersebut maka Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto

- a. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
  - 1) Bagian Adm Pemerintahan Umum
  - 2) Bagian Adm Kesra
  - 3) Bagian Adm Perekonomian
  - 4) Bagian Pembangunan

- b. Asisten Umum, terdiri dari :
- 1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan
  - 2) Bagian Organisasi dan Tata laksana
  - 3) Bagian Humas dan Protokol
  - 4) Bagian Umum

## **2. Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto**

Menurut Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto terdapat 4 bidang. Bidang tersebut adalah Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang UKM dan Fasilitas Pembiayaan dan Bidang Bina Koperasi. Bidang yang Perindustrian dan Bidang UKM dan Fasilitas Pembiayaan ini yang berkaitan dengan sinergi pemerintah dengan pengrajin kerajinan sepatu. Hal ini akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

### **a. Bidang Perindustrian**

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, aspek manajemen, permodalan dan pemasaran serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri baik industri besar, menengah maupun kecil serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
- b Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta aspek manajemen, permodalan dan pemasaran di bidang industri kecil;
- c Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
- e Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri besar, industri menengah dan industri kecil;
- f Penyiapan bimbingan teknis serta pemantauan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan industri.

b. Bidang Bina UKM dan fasilitas pembiayaan

(1) Bidang Bina Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Fasilitas Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan rencana kegiatan, penjabaran kebijakan teknis dan melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan usaha kecil menengah di bidang simpan pinjam, fasilitas pembiayaan dan jasa keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Bina Usaha Kecil Menengah dan Fasilitas Pembiayaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan pedoman dan pengembangan di bidang usaha kecil menengah dan usaha simpan pinjam;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan promosi daerah usaha kecil menengah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada usaha kecil menengah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka fasilitasi pembiayaan jasa keuangan, koperasi dan UKM dan Bina Usaha Simpan Pinjam;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kecil menengah.

### 3. Gambaran Umum Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan

Sejak Zarnan pemerintahan Hindia Belanda Wilayah Kelurahan Miji terdiri dari 3 (tiga) pedukuhan yaitu:

1. Pedukuhan Miji
2. Pedukuhan Kedungkwali
3. Pedukuhan Sinoman

Sejak Tahun 1969 karena perkembangan pembangunan dan guna rnemudahkan urusan adminstrasi serta pelayanan kepada masyarakat, maka pedukuhan Miji dipecah menjadi 2 lingkungan yaitu Miji Lama dan Miji Baru sehingga Kelurahan Miji terdiri dari:

1. Lingkungan Miji Lama
2. Lingkungan Miji Baru
3. Pendukuhan Sinoman
4. Pedukuhan Kedungkwali

Dan selanjutnya istilah pedukuhan berganti istilah dengan lingkungan untuk seluruh Pedukuhan yang berada di wilayah Kelurahan Miji Kecamatan Kota. Pada tahun 1984 karena perkembangan pembangunan di Perkotaan, Pemerintah Kota Mojokerto secara Administratif dibagi menjadi 2 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon, maka Kelurahan Miji yang terdiri dan 4 Lingkungan yaitu : Lingkungan Miji larna, Lingkungan Sinoman, Lingkungan Kedungkwali serta Lingkungan secara Administratif masuk wilayah Kecamatan

Prajuritkulon. Mulai tahun 2016 Kelurahan Miji masuk wilayah administratif Kelurahan Kranggan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Miji pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015**

No.	Uraian	Keterangan	
1.	Laki-laki	4.578	Orang
2.	Perempuan	4.660	Orang
3.	Kepala Keluarga	2.689	KK

*Sumber: Diolah Penulis dari Profil Kelurahan Miji Tahun 2014*

Dari data tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki 4.578 orang, jumlah penduduk perempuan 4.660 orang dan kepala keluarga yang ada berjumlah 2.689 kepala keluarga. Jumlah penduduk Kelurahan Miji dominan adalah perempuan yang selisih 82 orang dengan penduduk laki-laki. Sehingga dapat disimpulkan total jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kelurahan Miji pada tahun 2015 adalah 9.238 orang.

Kelurahan Kranggan merupakan kelurahan baru yang diresmikan pada 20 Juni 2016. Kota Mojokerto memecah wilayahnya dari dua kecamatan jadi tiga kecamatan. Pembentukan satu kecamatan baru ini diharapkan dapat menciptakan layanan pada penduduk Kota Mojokerto lebih efektif dan efisien. Pengajuan kecamatan baru sejak tahun 1994 dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri 18 April

2016 melalui surat No 138/2058/BAK. Kecamatan baru ini adalah Kecamatan Kranggan. Dengan dibentuknya kecamatan baru, sehingga 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Magersari masuk ke Kecamatan Kranggan. Keempat kelurahan tersebut diantaranya Kelurahan Meri, Jagalan, Sentanan dan Purwotengah. Sementara Kelurahan Miji dan Karanggen yang pada awal mulanya masuk di Kecamatan Prajurit Kulon menjadi bagian dari Kecamatan Kranggan.

#### **4. Gambaran Umum Kampung Sepatu**

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “Kampung” artinya kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah). Kampung juga berarti desa, dusun, atau kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu yang terletak di bawah kecamatan. Berdasarkan uraian tersebut kampung di Kota Mojokerto memiliki potensi unggulan pada sektor perekonomian masyarakat. Beberapa warga kampung di Kota Mojokerto telaten mengembangkan berbagai produk kerajinan sepatu.

Potensi itulah yang kemudian dianggap serius oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto dengan membentuk kampung sepatu. Seiring berjalannya waktu, keberadaan kampung sepatu tersebut yang juga terdiri dari beberapa usaha kecil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga telah

meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Di wilayah Kota Mojokerto terdapat salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kranggan yang didalamnya terdapat Kelurahan Miji. Kampung sepatu yang memiliki industri kecil menengah terbanyak terdapat pada Kelurahan Miji. Produk Unggulan yang ada di Kota Mojokerto dalam bentuk kerajinan tangan (*handycraft*) adalah sepatu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Diskoperindag merintis Kampung Sepatu sejak 2012. Hal ini merupakan upaya untuk menarik masyarakat khususnya dari luar kota untuk mengenal sepatu hasil produksi Mojokerto. Dengan begitu akan banyak wisatawan luar kota datang berkunjung, dan Kampung Sepatu menjadi salah satu objek wisata di Kota Mojokerto. Kota Mojokerto minim Sumber Daya Alam (SDA). Oleh karena itu, diharapkan kampung sepatu dapat menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi, khususnya dari luar kota.

Melihat adanya potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kampung sepatu, Diskoperindag melakukan sinergi dengan pengrajin kerajinan sepatu. Mulai tahun ,Diskoperindag Kota Mojokerto melakukan pengembangan pemberdayaan terhadap kampung sepatu khususnya pengrajin sepatu. Pengrajin kerajinan sepatu di Kampung sepatu memiliki sebuah Komunitas yaitu KOMPAK (Komite Pengusaha Alas Kaki).

Masyarakat yang mengikuti KOMPAK ini masih belum terdata secara lengkap di Kelurahan Miji. Adapun data anggota pengrajin sepatu yang ada di Kelurahan Miji adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Anggota Pengrajin Sepatu Di Kampung Sepatu**

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1	H. Sodiq	Jl. Brawijaya	Pengrajin sepatu
2.	Djoko Purnomo	Sinoman III/31	Pengrajin sepatu
3.	H. Kusnan	Sinoman III/31	Pengrajin sepatu/sandal
4.	H. Suyitno	Jl. Brawijaya/ 123	Pengrajin sepatu
5.	Sucipto	Sinoman VI/ 16	Pengrajin sepatu
6.	M. Atik	Sinoman Tengah	Pengrajin sepatu

*Sumber: Diolah Penulis Dari Data UKM (Bidang: Industri, Perdagangan, Jasa, Pertanian & Peternakan) Tahun 2015*

Pengrajin sepatu di Kampung sepatu kelurahan miji yang dikelola oleh KOMPAK memiliki kualitas bagus dengan jahitan rapi dan desain yang *up to date*. Para pengrajin sepatu di kampung sepatu kelurahan miji kebanyakan adalah bapak-bapak, karena kebanyakan matapencahariannya menjadi pengrajin.

## **B. Penyajian Data Fokus**

### **1. Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto**

a) **Peningkatan Kemampuan Finansial**

Pengembangan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan finansial dari usaha mikro kecil dan menengah pengrajin sepatu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Berdasarkan sudut pandang manajemen modern bahwa keuangan merupakan salah satu faktor fungsional manajemen disamping pemasaran dan produksi. Maka dari itu, Pemerintah Daerah diwakili Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam mendukung peningkatan produksi dari kerajinan sepatu adalah meningkatkan kemampuan finansial dari UMKM dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengrajin sepatu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nurjannah, sebagai berikut:

“..kalau akses modal Pemerintah Kota Mojokerto bekerjasama dengan PT. BPR Syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan adanya PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah) kegiatan pembiayaan kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil Menengah) oleh PT. BPR Syariah dengan sistem akad murabahah ditanggung BAZNAS Kota Mojokerto dengan dana infaq dan shadaqah, proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota mojokerto. Modal tersebut tanpa bunga” (Wawancara pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 10.00 wib di Kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Emru, sebagai berikut:

“..akses modal yang diberikan pemerintah ya dari PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah) *Mbak* dengan proses verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan *Mbak*. Jadi pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Badan Amil Zakat untuk pembiayaan UMKM dan IKM *Mbak*. Verikasinya sesuai dengan kriteria persyaratan *Mbak* dan kalau rekomendasinya peserta PUSYAR mempunyai tunggakan yang belum dilunasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi untuk realisasi” (Wawancara pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 14.00 wib di rumah Bapak Emru selaku ketua KOMPAK dan pengrajin sepatu)

Hal ini juga diungkapkan oleh Djoko Purnomo, sebagai berikut:

“..pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan modal melalui program yang namanya PUSYAR *Mbak*. Bantuan modal yang diberikan pemerintah maksimal Rp 10.000.000,00. Bantuan modal juga harus melewati proses verifikasi dan rekomendasi dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan *Mbak*” (Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 13.30 wib di rumah Bapak Djoko Purnomo selaku pengrajin sepatu)

Akan tetapi, dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada pengrajin sepatu belum mencukupi kebutuhan untuk proses memproduksi sepatu. Seperti yang diungkapkan oleh Muhajir, sebagai berikut:

“..bantuan modal dari pemerintah maksimal diberikan Rp 10.000.000,00 saja *Mbak*. Dana tersebut masih belum cukup untuk membeli bahan baku sepatu dalam satu bulan. Dana bantuan Rp 10.000.000,00 hanya cukup untuk memproduksi sepatu dalam waktu seminggu *Mbak*”

(Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Muhajir selaku pengrajin sepatu)

Hal ini juga diungkapkan oleh Surojudin, sebagai berikut:

“..bantuan modal dari pemerintah sebenarnya nggak cukup *Mbak* untuk membeli kebutuhan produksi sepatu. Bantuan yang diberikan pemerintah maksimal hanya Rp 10.000.000. Sedangkan untuk memproduksi sepatu dengan modal segitu kurang. Saya butuh bantuan modal dari pihak lain. saya pinjam dari saudara-saudara untuk memulai usaha produksi sepatu saya *Mbak*. Jadi modal yang saya gunakan dari pemerintah dan saudara saya” (Wawancara pada 10 Desember 2016 wib di rumah Bapak Surojudin pukul 10.00 wib selaku pengrajin sepatu)

Akses modal yang diberikan kepada pengrajin dari pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan bekerjasama dengan PT. BPR Syariah dan Badan Amil Zakat dengan jumlah maksimal Rp 10.000.000 untuk setiap UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto. Bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada pengrajin memang cukup terbatas. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto sehingga untuk bantuan modal terbagi untuk semua UMKM dan IKM. Hal ini diungkapkan oleh Retno sebagai berikut:

“..bantuan modal yang diberikan pemerintah kepada pengrajin untuk modal usahanya memang cukup terbatas. Hal ini karena banyaknya jumlah pelaku UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto sehingga pemerintah harus membagi rata untuk pemberian modal kepada seluruh pengrajin. Persyaratan untuk bantuan modal juga sama dengan pelaku usaha yang lain sehingga tidak ada perbedaan antar pelaku usaha dalam pemberian bantuan

modal” (Wawancara pada 13 Desember 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Dengan demikian, akses modal yang diberikan pemerintah daerah dapat dirasakan kemudahan dalam finansial usaha mereka melalui tambhan modal. Melalui penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa terhambatnya perkembangan usaha kecil akibat kekurangan modal dan juga terbatasnya bantuan modal dari pemerintah daerah.

#### **b) Pengembangan Pemasaran**

Pengembangan pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi dalam usaha kecil karena kelangsungan hidup usaha kecil ditentukan dari pasar. Apabila banyaknya permintaan pasar semakin besar pula peluang usah kecil dapat bertahan. Melihat kondisi perkembangan usaha kecil kerajinan sepatu pada umumnya pemasaran dari kerajinan sepatu pada pasar domestik. Maka pengembangan pemasaran yang dilakukan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan berupa pameran sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurjannah sebagai berikut:

“..kalau pemasaran, pemerintah pernah mengadakan pameran untuk memasarkan hasil produksi UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto khususnya produk unggulan Kota Mojokerto yaitu sepatu. Setiap tahunnya pemerintah menggelar pameran untuk meningkatkan kemitraan bagi koperasi dan UMKM dan IKM serta sebagai ajang promosi jaringan pemasaran. Pemerintah menggelar pameran untuk pengrajin tanpa ada pungutan biaya *stand* pemasaran. Tema pameran yang pernah diadakan seperti Festival UMKM dan Kreatif Jatim, 97 tahun Mojokerto

Service City, cinta kotaku, cinta produkku, sejahtera rakyatku, maju bangsaku dan Griya Kriya” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Muhajir, sebagai berikut:

“..untuk pemasaran yang dilakukan pemerintah untuk pengrajin, pemerintah mengadakan pameran setiap tahunnya untuk memasarkan produksi UMKM dan IKM yang di Kota Mojokerto khususnya sepatu *Mbak*. Tema pameran yang pernah diadakan seperti festival UMKM dan Kreatif Jatim, 97 tahun Mojokerto *Service City*, cinta kotaku, cinta produkku, sejahtera rakyatku, maju bangsaku dan Griya Kriya *Mbak* ” (Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Muhajir selaku pengrajin sepatu)

Hal ini juga diungkapkan oleh Surojudin, sebagai berikut:

“..kalau untuk pemasaran pemerintah mengadakan pameran setiap tahun *Mbak*. Tujuan pemerintah mengadakan pameran untuk meningkatkan akses usaha kecil menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti antara supplier dan buyer serta koperasi UMKM dan IKM. Kalau ada pameran mereka jadi lebih mengetahui produk asli Kota Mojokerto khususnya hasil sepatunya seperti apa *Mbak*. Setiap adanya pameran yang diadakan sebagai pengrajin nggak pernah dipungut biaya untuk *stand* pamerannya *Mbak*” (Wawancara pada 10 Desember 2016 wib di rumah Bapak Surojudin selaku pengrajin sepatu)



**Gambar 4. Pameran Gelar Kriya**

*Sumber: dokumentasi data penelitian penulis dalam acara Pameran Gelar Kriya 2016*

Selain pameran yang diadakan pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dalam pengembangan pemasaran hasil produksi sepatu juga dilakukan melalui *website*. Pemerintah mencantumkan nama usaha dagang, pemilik usaha dagang serta kontak yang dapat dihubungi yang bertujuan untuk melihat hasil produksi sepatu atau membeli hasil produksi melalui *website* atau situs resmi Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Retno sebagai berikut:

“..pengembangan pemasaran hasil produksi sepatu juga dilakukan melalui website Pemerintah Kota. Pemerintah Kota mencantumkan nama usaha dagang, pemilik dagang dan kontak yang dapat dihubungi untuk membeli hasil produksi atau melihat hasil produksinya” Wawancara pada 13 Desember 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Dengan demikian, pengembangan pemasaran yang dilakukan pemerintah daerah kepada pengrajin melalui *website* disamping itu mengikuti pameran-pameran di berbagai daerah khususnya di Kota Mojokerto sendiri. Pameran yang diadakan di Kota Mojokerto digelar setiap tahun untuk produksi UMKM dan IKM.

### c) **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan sumber daya manusia yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Peindustrian dan Perdagangan berupa pelatihan kepada pengrajin. Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan ini bertujuan untuk mengajari para pengrajin untuk memproduksi sepatu sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurjannah sebagai berikut:

“..pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan dan pembinaan untuk pengrajin sepatu khususnya untuk yang baru memulai usahanya. Apabila pengrajin sudah pernah mendapatkan pelatihan, maka pengrajin tidak mendapatkan pelatihan lagi. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan mengenai *website* dan *desain* produk. Selain itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan tempat pelatihan (*workshop*) yang ada di Jl.Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul

10.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Emru, sebagai berikut:

“...kalau untuk pengembangan sumber daya manusia pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan para pengrajin untuk tempat pelatihan (*workshop*) Mbak. Pemerintah memberikan kepercayaan kepada kelompok pengusaha alas kaki (KOMPAK) untuk mengelola tempat tersebut” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 14.00 wib di rumah Bapak Emru selaku ketua KOMPAK dan pengrajin sepatu)



**Gambar 5. Gedung Workshop**

*Sumber: dokumentasi data penelitian penulis Gedung Workshop 2016*

Hal ini juga diungkapkan oleh Muhajir, sebagai berikut:

“..untuk pengembangan sumber daya manusia, pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan untuk pengrajin sepatu khususnya untuk yang baru memulai usahanya *Mbak*. Apabila pengrajin sudah pernah mendapatkan pelatihan, maka pengrajin tidak mendapatkan pelatihan lagi. Setelah saya mendapatkan pelatihan itu, saya juga belajar dari teman sesama pengrajin sepatu untuk melatih kemampuan saya dalam memproduksi sepatu. Seharusnya pelatihan ini diadakan setiap 6 bulan sekali” (Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Muhajir selaku pengrajin sepatu)

Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan mengenai website dan desain produk. Selain itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan tempat pelatihan (*workshop*).

**d) Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha**

1) Kemudahan Layanan Perijinan

Kemudahan layanan perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu pengrajin kerajinan sepatu untuk mendirikan usahanya. Hal ini diungkapkan oleh Retno sebagai berikut:

“..kemudahan layanan perijinan untuk pengrajin mendirikan usahanya sudah tertulis jelas di Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan. Dalam Perda itu sudah tertera jelas persyaratan ijin baru dan persyaratan perpanjangan ijin” (Wawancara pada 13 Desember

2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto) Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Muhajir, sebagai berikut:

“..kalau untuk layanan ijin mendirikan usaha saya dan pengrajin sudah cukup terbantu *Mbak*. Layanan ijin usahanya cukup mudah. Waktu penyelesaiannya juga cukup cepat dan tidak dipungut biaya *Mbak*” (Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Muhajir selaku pengrajin sepatu)

Dengan demikian, kemudahan layanan perijinan mendirikan usaha telah terdapat pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Dalam Bidang Industri dan Perdagangan. Persyaratan dalam mendirikan usaha terdapat persyaratan izin baru dan persyaratan izin perpajakan. Berdasarkan persyaratan ijin usaha tersebut waktu penyelesaiannya cukup cepat dan tidak dipungut biaya dalam mengurus ijin usaha. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Mojokerto tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Selain itu terdapat hasil rekap industri sepatu Kota Mojokerto tahun 2011-2015 yang menunjukkan banyak usaha dagang yang mulai mendirikan usahanya.

**Tabel 5. Rekap Industri Sepatu Kota Mojokerto Tahun  
2011-2015**

NO.	TAHUN	UNIT USAHA	TENAGA KERJA
1.	2011	270	2.689
2.	2012	302	3.044
3.	2013	334	3.399
4.	2014	366	3.754
5.	2015	398	4.109

*Sumber: Diolah Penulis dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 2016*

Berdasarkan hasil rekap industri sepatu di Kota Mojokerto, setiap tahun unit usaha terus meningkat. Peningkatan unit usaha yang cukup tinggi adalah pada tahun 2014 ke tahun 2015. Peningkatan itu berjumlah 32 unit usaha. Sedangkan untuk tenaga kerja relatif stabil yaitu berjumlah 355 tenaga kerja setiap tahunnya.

## 2) Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengembangan pemberdayaan pemerintah dengan kelompok pengrajin. Upaya pemerintah ini untuk mengendalikan fungsi kelembagaan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan. Hal ini diungkapkan oleh Emru sebagai berikut:

“..kelompok pengrajin sepatu yang ada di Kota Mojokerto ini membuat komunitas yang namanya KOMPAK yaitu Komunitas Pengusaha Alas Kaki. Awalnya adanya KOMPAK bertujuan untuk mengajak pengrajin saling bekerjasama untuk mengembangkan usaha kecil *Mbak*. Jumlah perajin sepatu dan sandal di wilayah Kelurahan Miji saja lebih dari 200 orang. Jumlah ini hanya pemilik usahanya saja. Kalau dibuat rata-rata setiap pengrajin atau pemilik usaha memiliki 5 tenaga kerja saja, maka akan didapatkan 1.000 orang yang bekerja pada sektor produksi alas kaki *Mbak*. Jumlah ini hanya untuk satu kelurahan saja. Dan masih banyak kelurahan lain yang juga memiliki banyak perajin sepatu, seperti Blooto, Surodinawan, Prajurit Kulon dan lainnya *Mbak*” (Wawancara pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 14.00 wib di rumah Bapak Emru selaku ketua KOMPAK dan pengrajin sepatu)

Kelompok pengrajin sepatu yang ada di Kota Mojokerto dinamakan Komunitas Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK). Komunitas ini tidak hanya pengrajin dari kelurahan Miji saja akan tetapi dari kelurahan lain seluruh Kota Mojokerto. KOMPAK ini dibentuk untuk mengajak pengrajin saling bekerjasama untuk mengembangkan usaha kecil. Komunitas ini juga merupakan fungsi kelembagaan pemerintah dalam bidang kewirausahaan. Pengrajin sepatu yang paling banyak terdapat di kelurahan Miji. Hal ini juga diungkapkan oleh Surojudin sebagai berikut:

“Memang harus diakui yang paling banyak ya di kelurahan Miji, khususnya Kedungkwali *Mbak*. Untuk data pengrajin sepatu yang ada di kelurahan

Miji yang mengikuti KOMPAK masih akan didata lagi *Mbak*. Karena hampir setiap tahun meningkat pengrajin yang memproduksi sepatu” (Wawancara pada tanggal 10 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Surojudin selaku pengrajin sepatu)

Dengan demikian, penguatan kelembagaan yang diberikan oleh pemerintah tidak melepaskan tanggungjawab untuk berusaha membina pengrajin kerajinan sepatu menjadi yang inovatif dan mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga kedepannya kerajinan sepatu ini dapat menjadi produk unggulan Kota Mojokerto yang disegani oleh masyarakat lokal maupun internasional.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto**

### **a. Faktor Pendukung**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah kerajinan sepatu kelurahan Miji merupakan UMKM yang sangat berpotensi melalui produk sepatunya mampu menembus pasar secara lokal disamping itu mampu menjadikannya sebagai produk unggulan daerah. Untuk mencapai tahap keberhasilan tersebut maka diperlukan adanya faktor pendukung dari usaha tersebut. Faktor pendukung dalam pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin

sepatu agar mampu menjadikan sepatu sebagai produk unggulan daerah adalah sebagai berikut:

1) Internal

Pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah mempunyai faktor pendukung. Faktor internal yang dapat mempengaruhinya adalah tenaga kerja yang cukup banyak.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Retno sebagai berikut:

“..untuk memproduksi sepatu tenaga kerja yang dibutuhkan cukup banyak. Di Kota Mojokerto khususnya kelurahan Miji mempunyai tenaga kerja untuk memproduksi sepatu. Setiap usaha dagang sepatu mempunyai 20 orang hingga 28 orang tenaga kerja untuk memproduksi” (Wawancara pada 13 Desember 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Hal ini juga sama diungkapkan oleh Emru sebagai berikut:

“Jumlah perajin sepatu dan sandal di wilayah Kelurahan Miji saja lebih dari 200 orang. Jumlah ini hanya pemilik usahanya saja. Kalau dibuat rata-rata setiap pengrajin atau pemilik usaha memiliki 5 tenaga kerja saja, maka akan didapatkan 1.000 orang yang bekerja pada sektor produksi alas kaki *Mbak*. Kenyataannya, setiap pengrajin mempunyai 20 orang hingga 28 orang tenaga kerja. Jumlah ini hanya untuk satu kelurahan saja *Mbak*” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 09.00 wib di rumah Bapak Emru selaku ketua KOMPAK)

Dengan demikian, faktor internal dalam pengembangan pemberdayaan adalah tenaga kerja yang

cukup banyak menjadikan kemudahan dalam mengembangkan kerajinan sepatu sehingga sampai saat ini kerajinan sepatu di Kelurahan Miji masih dapat tetap bertahan untuk memproduksi sepatu. Disamping itu dengan banyaknya warga Kelurahan Miji sebagai tenaga kerja maka dapat mengurangi pengangguran yang ada di Kelurahan Miji tersebut selain itu juga dapat menambah penghasilan warga sebagai usaha sampingan.

## 2) Eksternal

Pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah mempunyai faktor pendukung. Faktor eksternal yang dapat mengembangkan pemberdayaan adalah salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Retno sebagai berikut:

“..untuk faktor eksternal yang mengemangkan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin adalah salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan untuk menarik daya wisata yang ada di Kota Mojokerto khususnya kampung sepatu yang memproduksi sepatu berbagai macam bahan. Hal ini juga dikarenakan akses transportasi yang cukup mudah. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usaha kecil yang ada di Kota Mojokerto khususnya kelurahan Miji” (Wawancara pada 13 Desember 2016 pukul 09.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Dengan demikian, faktor eksternal yang dapat mengembangkan pemberdayaan adalah salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto. Hal ini dikarenakan untuk menarik daya wisata yang ada di Kota Mojokerto khususnya kampung sepatu yang memproduksi sepatu berbagai macam bahan. Hal ini juga disebabkan di Kota Mojokerto masih belum banyak memiliki tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat diluar wilayah Kota Mojokerto.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### 1) Internal

##### a) Rendahnya Kualitas Sumber daya Manusia

Pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat internal yang dapat mempengaruhinya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nurjannah sebagai berikut:

“..dalam faktor penghambat internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia yang latar pendidikannya masih rendah, mengandalkan keterampilannya secara otodidak, dalam merekrut tenaga kerja hanya dari orang-orang yang sudah tidak sekolah atau yang sudah tidak bekerja” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 10.00 wib di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto)

Pada dasarnya para pengrajin kerajinan sepatu ini latar pendidikannya masih rendah. Mereka mengandalkan keterampilan yang hanya secara otodidak dalam menjalankan usahanya. Selain itu dalam merekrut tenaga kerja para pengrajin hanya dari orang-orang yang sudah tidak bekerja atau yang sudah tidak sekoah. Rata-rata pekerja diajari oleh pengrajin yang ada dengan menggunakan pembelajaran dari dasar atau keterampilan yang spesifik untuk para pekerjanya saja.

b) Terbatasnya Modal

Bagi para pengrajin, modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan usaha. Karena apabila kurangnya modal dapat menjadi penghambat bagi perkembangan industri kecil tersebut. Untuk dapat melanjutkan memproduksi sepatu, setiap pengrajin membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membeli bahan baku. Modal dalam hal ini adalah faktor yang cukup penting karena dengan adanya modal yang cukup maka kebutuhan untuk menjalankan usaha akan lebih baik. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah berupaya memberikan bantuan modal untuk para pengrajin khususnya pengrajin sepatu. Seperti yang diungkapkan Bapak Muhajir, sebagai berikut:

“..bantuan modal dari pemerintah maksimal diberikan Rp10.000.000,00 saja *Mbak*. Dana tersebut masih belum cukup untuk membeli bahan baku sepatu dalam satu bulan. Dana bantuan Rp 10.000.000,00 hanya cukup untuk memproduksi sepatu dalam waktu seminggu *Mbak*”(Wawancara pada 7 Desember 2016 pukul 10.00 wib di rumah Bapak Muhajir selaku pengrajin sepatu)

## 2) Eksternal

Tempat pemasaran untuk pengrajin sepatu merupakan suatu kebutuhan para pengrajin yang sangat dibutuhkan. Tempat pemasaran ini bertujuan untuk memasarkan hasil produksi sepatu yang dapat dibeli secara langsung oleh masyarakat yang datang ke Kota Mojokerto. Akan tetapi, tempat pemasaran ini masih belum ada. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan masih belum meminta rekomendasi untuk tempat pemasaran ini. Jadi para pengrajin masih memasarkan lewat *website* dan memasarkan produksinya di toko dekat rumah masing-masing. Seperti yang diungkapkan Bapak Emru, sebagai berikut:

“..tempat pemasaran untuk pengrajin sepatu di Kota Mojokerto selama ini masih belum ada *Mbak*. Kalau di Kabupaten Mojokerto sudah ada. Jadi selama ini saya memasarkan sepatu hanya lewat *website* sama toko-toko sebelah rumah *Mbak*. Kalau ada yang pesan yang *website* saya kirim lewat jasa pengiriman kalau sampai luar kota *Mbak*. Kebetulan pelanggan saya dari Bandung, Yogyakarta, Jember *Mbak*. Ini yang membuat Kota Mojokerto kalah bersaing dengan daerah lain” (Wawancara pada 6 Desember 2016 pukul 09.00 wib di rumah Bapak Emru selaku ketua KOMPAK).

## C. Pembahasan

### 1. Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto

World Bank (2001) pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan,dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Untuk dapat menjalankan perannya dalam mengembangkan pemberdayaan UMKM sebagai katalisator, Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam sebuah pengembangan pemberdayaan dengan pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah telah melaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam konsep diatas, antara lain memfokuskan dalam peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia serta pemberian pengaturan dan pengendalian usaha. Disini pemerintah daerah telah melaksanakan pengembangan pemberdayaan kepada pengrajin sepatu. Pemerintah

daerah dalam meningkatkan kemampuan finansial telah memberikan bantuan modal kepada para pengrajin untuk memenuhi kebutuhannya memproduksi sepatu. Pemerintah daerah memberikan akses modal untuk pengrajin melalui kerjasama dengan PT. BPR Syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Untuk pengembangan pemasaran, pemerintah daerah memberikan tempat untuk pameran kepada pengrajin.

Pameran yang dilaksanakan oleh pemerintah diadakan hamper setiap tahun. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan mengenai *website* dan desain produk. Selain itu, pemerintah daerah memberikan tempat *workshop* untuk pengrajin sepatu. Untuk pemberian pengaturan dan pengendalian usaha yang dilakukan pemerintah daerah yaitu kemudahan layanan perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk membantu pengrajin kerajinan sepatu untuk mendirikan usahanya.

Penguatan kelembagaan yang diberikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menjalin kerjasama antara pemerintah dengan kelompok pengrajin. Kelompok pengrajin sepatu yang ada di Kota Mojokerto dinamakan Komunitas Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK). Pengembangan kerajinan sepatu Kelurahan Miji tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan. Untuk itu perlu adanya pendampingan dari Dinas yang bertujuan untuk melihat langsung dilapangan terkait proses pengembangan dan produksi kerajinan sepatu.

Jadi peranan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sebagai fasilitator pengrajin sepatu mampu mewujudkan usaha kerajinan sepatu yang mandiri dan tangguh sebagai produk unggulan daerah khususnya Kota Mojokerto.

**a. Peningkatan Kemampuan Finansial**

Sudut pandang manajemen modern dapat diartikan bahwa keuangan atau finansial merupakan salah satu segi fungsional manajemen yang sangat penting selain pemasaran dan produksi. Dengan finansial yang cukup suatu usaha dapat menjadi pendukung untuk meningkatkan suatu produksi, sebaliknya suatu produksi akan terhambat atau terhenti jika kekuatan finansial yang dimiliki suatu usaha tersebut kecil. Menurut Gede Diva (2009:15-18) dalam Putra (2015:Vol 3), pengembangan pemberdayaan UMKM merupakan peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki

oleh UMKM. apabila UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Salah satu masalah yang dihadapi oleh semua usaha kecil adalah masalah finansial. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah memberikan perhatian dengan menyediakan fasilitas seperti bantuan modal.

Bantuan modal melalui PT. BPR Syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan adanya PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah) kegiatan pembiayaan kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan IKM (Industri Kecil Menengah) oleh PT. BPR Syariah dengan sistem akad murabahoh ditanggung BAZNAS Kota Mojokerto dengan dana infaq dan shadaqah, proses verifikasi dan rekomendasi dilakukan oleh dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota mojokerto. Program PUSYAR ada dua macam yaitu, PUSYAR jilid I dan PUSYAR jilid II. Pertama, PUSYAR jilid I menyediakan plafond pembiayaan Rp. 750.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan 12 samapai

dengan 18 bulan. Untuk PUSYAR jilid I diperuntukkan bagi UMKM ataupun IKM kota Mojokerto ataupun PNS yang keluarganya memiliki usaha. Kedua, PUSYAR jilid II menyediakan plafond pembiayaan Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan jangka waktu pembiayaan 24 bulan.

Untuk PUSYAR jilid II yang dapat mengakses yaitu UKM dan IKM yang bergerak dalam bidang ekonomi kreatif yang menjual produk unggulan khas Kota Mojokerto seperti usaha alas kaki, batik, *handycraft*, pengrajin miniatur perahu layar, makanan ringan dan catering. Akan tetapi sejak awal tahun 2016, PUSYAR yang diberikan kepada pengrajin dalam pembiayaan dibatasi maksimal Rp 10.000.000. Hal ini dikarenakan terbatasnya modal yang harus diberikan kepada seluruh UMKM dan IKM yang ada di Kota Mojokerto. Persyaratan program PUSYAR yang harus dipenuhi untuk pengrajin adalah foto copy KTP suami dan istri (2 lembar), foto copy kartu keluarga dan surat nikah (2 lembar), surat keterangan usaha (minimal dari kelurahan), surat keterangan domisili, jaminan asli (sertifikat dan/atau BPKB), menyerakan materai @Rp. 6.000,- sebanyak 6 lembar.

Pengrajin sepatu yang telah memperoleh bantuan modal untuk melalui program PUSYAR telah merasakan manfaatnya selain tidak takut kehabisan modal mereka juga akan lebih sehat secara finansial. Pengembangan pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto membuktikan bahwa telah mendapat respon dengan baik mengenai kelangsungan perkembangan industri kecil di wilayah Kota Mojokerto. Selain itu, memberikan bantuan modal merupakan perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengrajin industri kecil khususnya kerajinan sepatu.

**b. Pengembangan Pemasaran**

Pemasaran selalu menjadi kelemahan bagi usaha kecil menengah. Hal tersebut sesuai dengan faktor eksternal penghambat usaha kecil menengah (UKM) dalam mengembangkan usaha terutama terbatasnya dalam pengembangan pemasaran. Akses pasar yang terbatas akan berakibat pada produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan di pasar nasional maupun internasional. Dampak negatif dari terbatasnya akses pasar secara langsung akan mengakibatkan produksi yang dihasilkan kurang berkembang secara maksimal.

Maka dari itu Pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto harus mengantisipasi secara efektif. Untuk mengatasi antisipasi tersebut, maka harus adanya pengembangan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin khususnya kerajinan sepatu. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kerjasama dengan pihak lain sehingga mampu menciptakan produk yang berkualitas dan mampu menjadi produk unggulan daerah. Pengembangan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk mengembangkan UKM melalui adanya pameran dan *website*.

Hal ini dilakukan agar pengrajin dapat menangkap akses pasar dari luar yang belum terjangkau. Dengan penguasaan terhadap *website* pengrajin tidak akan kesulitan memasarkan produksi. Pemasaran melalui *website* saat ini sebagai hal yang biasa, karena pemasaran dilakukan secara bersifat universal, praktis, efektif, efisien. Selain itu Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan secara mandiri juga berusaha membantu pengrajin sepatu melalui even-even tertentu seperti dengan adanya pameran produk kerajinan sepatu.

Hal ini akan secara luas menarik minat konsumen baik dari daerah Mojokerto maupun luar daerah Mojokerto serta Masyarakat Jawa Timur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan pemberdayaan industri kecil khususnya pengrajin sepatu perlu dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan pemasaran kerajinan sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Meskipun pemerintah daerah sudah memberikan kesempatan diadakannya pameran untuk akses pemasaran akan tetapi pengrajin sepatu juga harus berusaha untuk mencari peluang daerah pemasaran yang baru dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah dalam memajukan usahanya.

**c. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam setiap kerjasama namun sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala yang selalu dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia. Suatu hal kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan kualitas produk sehingga tidak akan mengalami perubahan kualitasnya dengan memiliki kedua aspek tersebut akan mampu meningkatkan produktivitas dan dapat menembus pasar global. Melihat pentingnya

sumber daya manusia dalam sebuah industri kecil maka pemerintah dalam hal ini perlu mengembangkan sumber daya manusia pengrajin melalui program pelatihan.

Menurut Gede Diva (2009:15-18) dalam Putra (2015:Vol 3), pengembangan pemberdayaan UMKM merupakan peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator. Apabila UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Berdasarkan penjelasan diatas, peran pemerintah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya dalam melancarkan program pelatihan, seperti pelatihan proses produksi sepatu, desain sepatu dan *website*. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan inovasi, pemasaran dan kerjasama.

Pada saat ini pemerintah daerah telah berupaya lebih menggambarkan usaha industri kecil yang bertujuan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mojokerto mengupayakan pengembangan pemberdayaan dalam mengembangkan

sumber daya manusia kepada pengrajin kecil khususnya pengrajin kerajinan sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan melalui bimbingan pelatihan dengan mengadakan *workshop* untuk pengrajin kecil yang belum menguasai keterampilan dalam memproduksi sepatu. Latar belakang pendidikan pengrajin sepatu di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan kebanyakan memiliki pendidikan rendah yakni hanya sebatas SMP dan SMA. Selain itu pengrajin sepatu juga mendapatkan kemampuan membuat kerajinan sepatu dari hasil belajar secara otodidak.

Sementara itu, untuk pelatihan secara umum yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto yaitu dengan cara *workshop*. Tujuan dari *workshop* adalah untuk melatih para pelaku usaha kecil agar dapat terampil dan berinovasi sehingga mampu mendapatkan hasil produksi yang berkualitas yang dapat laku di pasaran. Dengan demikian, pengembangan pemberdayaan melalui pelatihan dari Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto diharapkan dapat memotivasi pengrajin kerajinan sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan agar berusaha lebih baik dalam menjalankan usahanya dan dapat

terus memproduksi sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu produk unggulan daerah.

**d. Pemberian Pengaturan dan Pengendalian Usaha**

**1) Kemudahan Layanan Perijinan**

Peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh banyak pihak pelaku usaha, terutama pada usaha kecil menengah. Peran pemerintah berfungsi memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terutama pada industri kecil menengah untuk mengembangkan usahanya. Peran pemerintah antara lain diwujudkan dalam bentuk pelatihan, bantuan finansial serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan kemudahan pemberian izin usaha karena dengan sudah memiliki izin usaha artinya usaha yang telah dimiliki oleh para pengrajin tersebut memiliki kekuatan hukum. Di Kota Mojokerto khususnya pada Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan guna membantu para pengrajin kerajinan sepatu. Dinas juga menyiapkan dan menerapkan untuk memberikan kemudahan bagi para pengrajin kerajinan sepatu untuk mendirikan usahanya agar memiliki kekuatan hukum.

Selain itu diharapkan dengan kemudahan tersebut akan mampu menarik minat masyarakat untuk semakin menambah jumlah usaha kerajinan sepatu. Kemudahan perijinan ini dimaksudkan agar dapat membantu pemerintah daerah Kota Mojokerto untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian masyarakat serta menjadikan Kota Mojokerto sebagai sentra industri kerajinan sepatu. Menurut Tohar (2002:31) dalam Candra (2014:Vol2) usaha kecil merupakan usaha untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil harus melalui aspek perundang-undangan serta aspek kebijakan. Salah satu aspeknya yaitu perijinan usaha yang dimaksud adalah penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perijinan usaha.

Hal ini bertujuan untuk mengupayakan sistem pelayanan satu atap serta memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perijinan. Hal ini terbukti bahwa terdapat usaha kecil kerajinan sepatu meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peranan yang

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar dapat saling memberikan simbiosis mutualisme.

## 2) Penguatan Kelembagaan

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan pendukung utama dan terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha Mikro Kecil Menengah juga yang paling besar dan paling cepat dalam memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan sumber penghasilan bagi kebanyakan masyarakat. Karena besarnya potensi yang dihasilkan dari usaha kecil tersebut dalam hal ini perlu adanya upaya mengembangkan pemberdayaan yang dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menumbuhkan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Banyak usaha kecil yang secara kuantitas maupun kualitas terdapat dari sumber daya manusia yang terbalik.

Peran pemerintah disini adalah untuk mengubah kuantitas yang sekedarnya menjadi kuantitas yang berkualitas. Usaha kecil menengah yang dalam hal ini adalah kerajinan sepatu merupakan tanggungjawab dari Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Dinas perlu mengatur serta mengendalikan usaha kerajinan sepatu ini agar secara kualitas orang-orang yang didalamnya memiliki pengetahuan, kompetensi dan keterampilan. Hal tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk menjadikan usaha ini dikenal secara luas dan dapat menjadi produk unggulan daerah.

Disini pemerintah daerah berinisiatif untuk mengembangkan usaha kecil agar dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga para pengrajin yang ada di Kota Mojokerto membentuk sebuah Komunitas yang dinamakan Komunitas Pengusaha Alas Kaki (KOMPAK). Pembentukan komunitas ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih mudah untuk mengendalikan serta mengatur usaha ini secara efektif.

Komunitas Pengusaha Alas Kaki di Kota Mojokerto ini mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang dialaminya dengan meminta rekomendasi dan berkonsultasi dengan Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Dengan adanya pengembangan pemberdayaan tersebut dapat secara cepat dan teratasi dan mampu memberikan inovasi kepada pengrajin sepatu dengan baik sehingga dapat menjadikan produk sepatu sebagai produk unggulan daerah.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah Daerah Dengan Pengrajin Sepatu Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kota Mojokerto**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Internal**

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kerajinan sepatu akan dapat berkembang dengan baik dengan adanya potensi dari sumber daya manusianya. Hal ini dilihat juga dari sisi kualitas dan kuantitas. Dari sisi kualitas diperlukannya peningkatan karena banyak hal yang mempengaruhi khususnya dari kualitas pendidikannya. Sedangkan dari sisi kuantitas yaitu sumber daya manusia di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Adanya tenaga kerja yang cukup banyak ini merupakan faktor pendukung para pengrajin kerajinan

sepatu karena tidak perlu susah mencari tenaga kerja dari daerah lain. Selain itu dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kelurahan Miji. Dengan adanya sumber daya manusia merupakan suatu potensi tersendiri dari Kelurahan Miji melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto sehingga dapat melaksanakan pengembangan pemberdayaan. Pengembangan pemberdayaan yang dilakukannya adalah pelatihan untuk mengembangkan usaha yang mandiri dan berkualitas. Masyarakat Kelurahan Miji mempunyai peluang dalam usaha kerajinan sepatu.

Karena masyarakat di Kelurahan Miji cukup banyak yang menganggur sehingga mampu untuk diarahkan untuk menjadi pengrajin. Disini pemerintah mendorong untuk membantu sentra usaha kerajinan sepatu agar dapat berkembang produksinya melalui pelatihan untuk kerajinan ini. Sehingga secara kualitas dan kuantitas sudah terpenuhi untuk meningkatkan usaha kerajinan sepatu di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.

## 2) Eksternal

Faktor pendukung eksternal yang dapat mengembangkan pemberdayaan pemerintah daerah dengan pengrajin sepatu adalah salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto. Faktor

ini dikarenakan Kota Mojokerto masih belum memiliki tempat wisata yang dapat menarik wisatawan dari lokal maupun internasional. Maka dari itu, pemerintah daerah berupaya membuat kampung sepatu yang dominan oleh pengrajin kerajinan sepatu. Hal ini bertujuan untuk menarik daya wisata yang ada di Kota Mojokerto khususnya kampung sepatu yang memproduksi sepatu berbagai macam bahan. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian dan mengembangkan usaha kecil yang ada di Kota Mojokerto khususnya kelurahan Miji.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Internal**

##### **a) Rendahnya kualitas sumber daya manusia**

Pengrajin sepatu di Kelurahan Miji ini adalah mereka yang lulusan SMA bahkan ada yang lulusan SMP yang terdapat di daerah sekitar Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan. Pengrajin ini tentunya masih belum mempunyai pengalaman. Pengrajinnya hanya mengandalkan keahlian secara otodidak. Hal ini menjadi hambatan di dalam pemberian pelatihan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Banyak pengrajin dan tenaga kerja ini membawa pengaruh dalam hal kualitas. Akan tetapi adanya tenaga kerja memberikan manfaat sumber daya manusia bagi pengrajin di

Kelurahan Miji. Melihat hal ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan untuk mengembangkan usaha mulai dari awal dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Keterbatasan sumber daya manusia pada kerajinan sepatu di Kelurahan Miji ini akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan, kreatifitas dan pemasaran produk.

Hal ini dikarenakan kekurangan informasi dan penguasaan teknologi yang modern. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menghambat perkembangan usaha kerajinan. Karena kualitas sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mengembangkan usaha.

b) Terbatasnya modal

Modal merupakan faktor yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Apabila kurangnya permodalan UKM, pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya cukup terbatas. Sedangkan untuk modal pinjaman dari bank sulit diperoleh karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Pada Kelurahan Miji disini juga mengalami kesulitan finansial yang dihadapi oleh pengrajin kerajinan sepatu untuk mengembangkan maupun memperluas usaha. Akses untuk bantuan modal yang diberikan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto telah disediakan, Akan tetapi, bantuan modal tersebut masih kurang untuk memenuhi kebutuhan produksi pengrajin.

Hal ini dapat mempengaruhi kuantitas produksi karena terbatasnya modal yang artinya bahan baku yang didapatkan relatif kecil dan bahan baku yang banyak juga membutuhkan modal yang besar pula. Sehingga para pengrajin memenuhi permintaan terhadap pesanan dari konsumen kerajinan sepatu dengan cara meminjam modal dari saudara mereka. Akan tetapi, modal yang dipinjamkan oleh saudara mereka juga tidak begitu banyak. Sehingga pemenuhan pesanan seadanya keuntungan juga relatif sedikit, perputaran akan perkembangan kenaikan ekonomi untuk masyarakat karena memang tidak ada modal dalam jumlah yang besar.

## 2) Ekternal

Tempat pemasaran untuk pengrajin kerajinan sepatu merupakan suatu kebutuhan para pengrajin yang sangat penting. Tempat pemasaran ini bertujuan untuk memasarkan hasil produksi sepatu yang dapat dibeli secara langsung oleh

masyarakat yang datang ke Kota Mojokerto. Namun tempat pemasaran ini masih belum ada. Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan masih belum meminta rekomendasi untuk tempat pemasaran ini. Selama ini para pengrajin masih memasarkan lewat *website* dan toko yang ada di dekat rumah mereka masing-masing.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan pengembangan pemberdayaan telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah telah meningkatkan kemampuan finansial berupa pemberian bantuan modal, dengan memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada pengrajin kerajinan sepatu melalui Program PUSYAR (Program Pembiayaan Usaha Syariah).
- 2) Pemerintah telah mengembangkan pemasaran berupa peningkatan akses usaha kecil, pengrajin kerajinan sepatu ini mengikutsertakan *event* pameran dan mengembangkan pemasarannya melalui *website* agar dapat dikenal masyarakat luar daerah Kota Mojokerto.
- 3) Pemerintah telah mengembangkan sumber daya manusia berupa pemberian pelatihan. Mengadakan pelatihan mengenai *website* dan desain produk.
- 4) Pemerintah telah memberikan pengaturan dan pengendalian usaha dilakukan dengan:
  - (a) Kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan pengurusan surat ijin mendirikan usaha pengrajin dengan cukup singkat.

- (b) Penguatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk KOMPAK (Komite Pengusaha Alas Kaki) Kota Mojokerto.
- 5) Pengembangan pemberdayaan ini mempunyai faktor pendukung dan penghambat oleh 2 hal yaitu secara internal dan eksternal.
- Faktor pendukung secara internal dan eksternal
- (a) Pengembangan pemberdayaan ini didukung secara internal dikarenakan tenaga kerja yang cukup banyak. Setiap usaha dagang sepatu mempunyai 20 orang hingga 28 orang tenaga kerja untuk memproduksi.
- (b) Pengembangan pemberdayaan ini juga didukung secara eksternal dikarenakan salah satu akses menuju pusat Kota Mojokerto. Salah satu akses ini dimanfaatkan untuk menarik daya wisata yang ada di Kota Mojokerto khususnya kampung sepatu yang memproduksi sepatu berbagai macam bahan. Selain itu akses transportasi yang cukup mudah.
- Faktor penghambat secara internal dan eksternal.
- (a) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- Para pengrajin sepatu ini latar pendidikannya masih rendah. Mereka mengandalkan keterampilan yang hanya secara otodidak dalam menjalankan usahanya.
- (a) Terbatasnya Modal
- Kesulitan modal yang dihadapi para pengrajin sepatu menjadi kendala dalam mengembangkan usaha ini karena pengrajin

masih banyak yang menggunakan modal sendiri. Sehingga mempengaruhi hasil produksi sepatu mereka.

- (b) Pengembangan pemberdayaan ini juga dihambat secara eksternal dikarenakan masih belum memiliki tempat pemasaran yang bertujuan untuk memasarkan hasil produksi sepatu yang dapat dibeli secara langsung oleh masyarakat luar daerah yang datang ke Kota Mojokerto. Jadi para pengrajin masih memasarkan lewat *website* dan memasarkan produksinya di toko dekat rumah masing-masing.

## **B. Saran**

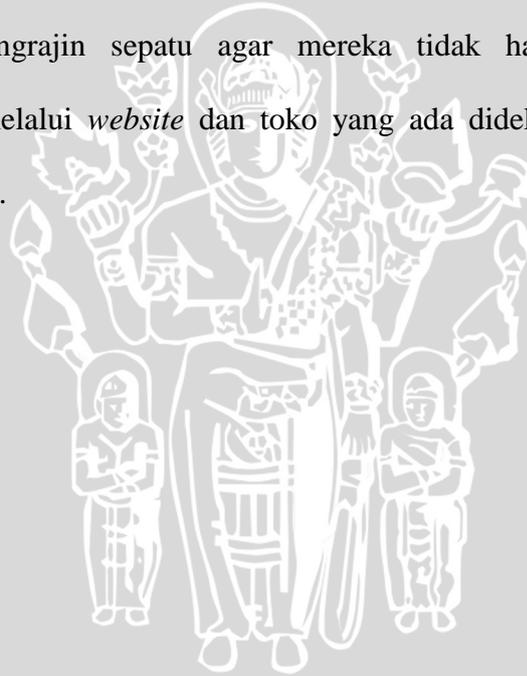
Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan terhadap Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya sinergi pengrajin sepatu sebagai produk unggulan daerah. Untuk mendapatkan hasil pengembangan pemberdayaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto lebih optimal lagi maka melakukan beberapa pembenahan yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan pengrajin dalam mengembangkan usahanya dan menjadikan sepatu sebagai produk unggulan daerah Kota Mojokerto. Hal ini dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu mengatasi keterbatasan modal yang ada pada pengrajin, salah satunya adalah dengan mencari alternatif bantuan modal

dengan cara memperluas jaringan kerjasama dengan pihak swasta atau bank agar dapat mengeluarkan pemberian modal kepada pengrajin.

2) Pemerintah perlu mengadakan pelatihan *website* maupun *desain* produk bagi pengrajin setiap 6 bulan sekali agar pengrajin dapat mendapatkan peluang besar didalam sebuah pemasaran.

3) Pemerintah belum menyediakan tempat pemasaran, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan segera mengajukan kepada Pemerintah Kota agar mendapatkan anggaran membangun gedung untuk tempat pemasaran pengrajin sepatu agar mereka tidak hanya memasarkan produksinya melalui *website* dan toko yang ada didekat rumah mereka masing-masing.



## DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, R. C. & J.C. Plano. 1998. *The public Administration Dictionary. Second Edition*: Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Dedy, Budi. 2013. Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Mempertahankan Kelangsungan Usaha UKM (Studi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu). Skripsi Vol 1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Provinsi Jawa Timur. 2016. "Data UMKM". Melalui <http://diskopumkm.jatimprov.go.id> [11/10/2016].
- Diva, Gede. 2009. "Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta". Jakarta : Bakrie School of Management.
- Doctoroff, Michael. 1997. *Synergistic Management*. New York. AMACOM Press.
- Duri, Arifia Anis. 2013. Modal Dan Tenaga Kerja Pengaruhnya Terhadap Hasil Produksi Sepatu (Studi Kasus Di Koperasi Produsen Sepatu Margosuryo Kota Mojokerto). Jurnal Fakultas Ekonomi Vol 1, No 2 Universitas Negeri Surabaya.
- Fitanto, Bahtiar. 2009. Analisis Omset Dan Posisi Bersaing Pada Klaster Usaha Kecil Menengah (UKM) Sepatu Kota Mojokerto. Jurnal Halaman 24 Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Khoirunnisa. 2016. Kerjasama Antar Aktor Pada Destinasi Pariwisata Gunung Banyak Sebagai Pengembangan Potensi Wisata Di Kota Batu (Studi Pada Wisata Gunung Banyak Desa Songgokerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Skripsi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Meleong. Lexy J. 2004. "Metodologi Penelitian kualitatif". Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.

Miles, Mathew B.A., Michael Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Third Edition*. SAGE Publications, Inc.

Mojokerto, Kabar. 2016. "Kecamatan Baru, Kecamatan Kranggan". Melalui <http://www.kabarmojokerto.com/kota-mojokerto-resmi-memiliki-satu-kecamatan-baru-kecamatan-kranggan.html> [6/12/2016].

Putra, Candra. 2014. Peran Disperindag Dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 95-101 Universitas Brawijaya Malang.

Putra, Taranggana Gani. 2015. Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, Universitas Airlangga.

Pasolog, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabeta.

Pemerintah Kota Mojokerto. 2016. "Profil Sejarah Kota Mojokerto". Melalui <http://www.mojokertokota.go.id/profil/sejarah> [5/12/2016].

Pemerintah Kota Mojokerto. 2016. "Profil Arti Lambang Kota Mojokerto". Melalui <http://www.mojokertokota.go.id/profil/arti.html> [5/12/2016].

Pemerintah Kota Mojokerto. 2016. "Profil Kondisi Geografis Kota Mojokerto". Melalui [http://www.mojokertokota.go.id/profil/kondisi\\_geo](http://www.mojokertokota.go.id/profil/kondisi_geo) [5/12/2016].

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Rokhayati, Isnaeni. 2015 . Pengukuran Kinerja pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Umkm ): Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Halaman 94 Manajemen Ekonomi UNWIKU Purwokerto*.

Santiko, Dedy. 2015. Sinergi Multi Stakeholder Dalam Mewujudkan Community Development Melalui Program Holcim Integrated Parming (Hifa) (Studi Pada Corporate Social Responbility Pt.Holcim Indonesia Tbk Tuban Plant Di Desa Sawir Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Skripsi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono. 2011. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung : ALFABETA.

Suryono, Agus. 2010. *“Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan”*. Malang : Universitas Brawijaya Press.

Tambunan, Tulus. 1999. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta. Salemba.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

LAMPIRAN 1

Gambar 1: Tempat Produksi Sepatu



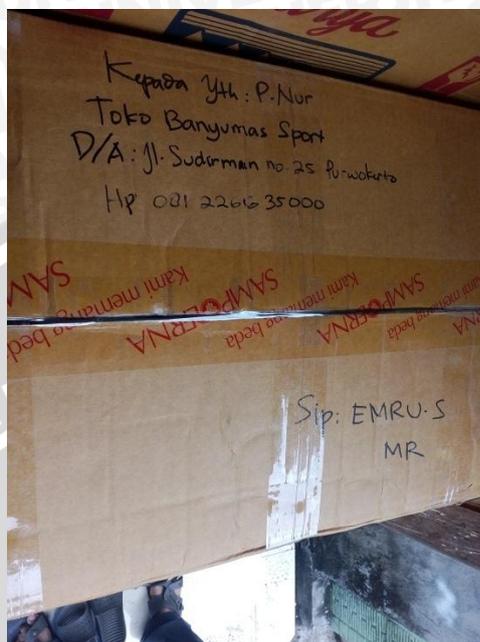
Sumber: Dokumentasi Penulis (7/12/2016)

Gambar: 2 Hasil Produksi Sepatu



Sumber: Dokumentasi Penulis (7/12/2016)

Gambar 3: Hasil Produksi Sepatu yang akan dikirim



Sumber: Dokumentasi Penulis (7/12/2016)

Gambar 4: Gedung Workshop



Sumber: Dokumentasi Penulis (8/12/2016)

Gambar 5: Pameran Gelar Kriya



Sumber: Dokumentasi Penulis (19/11/2016)

Gambar 6: Hasil Produksi Sepatu di Pameran Gelar Kriya

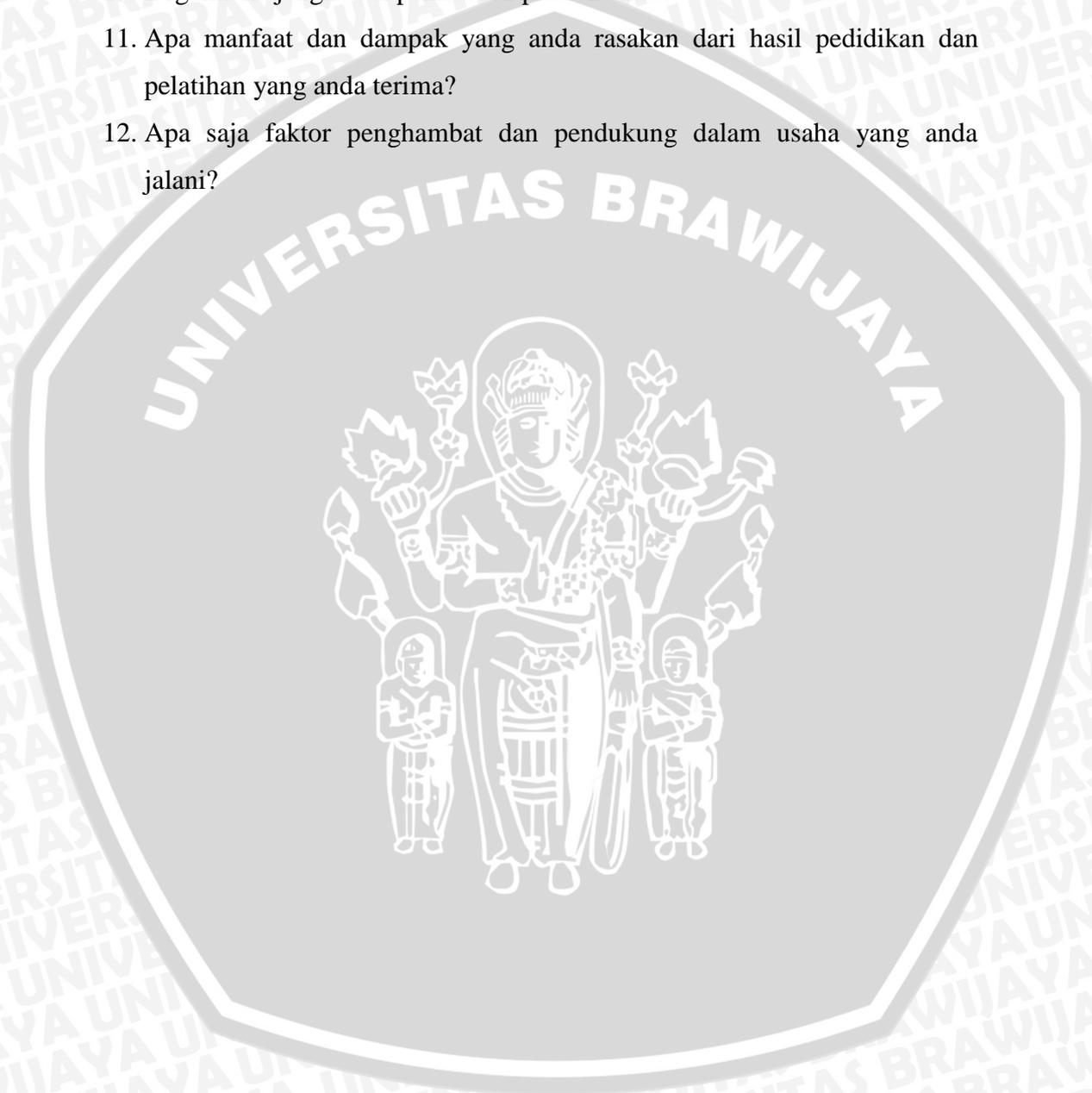


Sumber: Dokumentasi Penulis (19/11/2016)

**LAMPIRAN 2****DAFTAR PERTANYAAN**

- **Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto**
  1. Apa saja pengembangan pemberdayaan yang dilakukan dinas dengan pengrajin sepatu?
  2. Bagaimana cara dinas dalam memfasilitasi akses modal pengrajin sepatu?
  3. Berapa jumlah bantuan modal yang diberikan dari dinas kepada pengrajin?
  4. Apa saja syarat memperoleh bantuan modal dari dinas?
  5. Apakah dinas memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin?
  6. Pendidikan dan pelatihan apa yang diberikan?
  7. Bagaimana bentuk bantuan pemasaran untuk meningkatkan akses usaha kecil yang dilakukan oleh dinas?
  8. Bagaimana bentuk fasilitas yang dilakukan oleh dinas dalam hal perijinan?
  9. Ada berapa pengrajin sepatu di Kelurahan Miji yang sudah memiliki merk dagangnya sendiri?
  10. Apa faktor pendukung dinas dalam bekerjasama dengan pengrajin sepatu secara internal dan eksternal?
  11. Apa faktor penghambat yang dihadapi dinas dalam bekerjasama dengan pengrajin sepatu secara internal dan eksternal?
  
- **Pengrajin Sepatu di Kampung Sepatu Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto**
  1. Berapa jumlah tenaga kerja dalam usaha anda ini?
  2. Apa saja produk yang anda hasilkan?
  3. Apa saja bahan baku yang anda perlukan?
  4. Apakah susah atau tidak dalam mendapatkan bahan baku tersebut?
  5. Butuh modal berapa dalam menjalankan usaha ini?
  6. Apakah sepenuhnya modalnya dari Pemerintah?
  7. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto?

8. Apa bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas?
9. Bagaimana cara dinas dalam memfasilitasi pengrajin untuk mendapatkan kemudahan izin usaha perdagangan?
10. Bagaimana jangkauan pemasaran produk anda?
11. Apa manfaat dan dampak yang anda rasakan dari hasil pendidikan dan pelatihan yang anda terima?
12. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam usaha yang anda jalani?



**SURAT PERMOHONAN  
PINJAMAN MODAL USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH  
DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Mojokerto  
Up. PPTK Fasilitasi Bagi IKM Terhadap Pemanfaatan  
Sumber Daya Tahun 2015  
Jl. Raya Meri No. 7  
di -  
MOJOKERTO.

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pinjaman Modal Usaha Industri Kecil dan Menengah untuk usaha kami :

**A. IDENTITAS PEMOHON**

Nama Perusahaan/Usaha : .....

Alamat perusahaan : Jl. ....

Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

No. Telp. : .....

**B. KEADAAN USAHA**

Jenis Produk : .....

Jumlah Modal Usaha : .....

Jumlah Tenaga Kerja : LK. .... PR. ....; Jml. .... Orang.

Harga Jual per Satuan : .....

Jumlah Produksi / bln : .....; Hari Kerja/Thn .....

Hasil Penjualan : Rp..... per bulan

Biaya Produksi : Rp..... per bulan

Keuntungan : Rp..... per bulan

C. Rencana Permohonan Modal : Rp. ....

( ..... )

Untuk Keperluan : .....

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Mojokerto, tgl.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

Foto copy KTP Pemohon \*)

Foto copy Tanda Daftar Industri (TDI)

Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Foto copy NPWP

Surat Rekomendasi Kelurahan di Tempat Usaha\*)

Pemohon,

Ket: \*) wajib dilampirkan

( ..... )

Nama lengkap

**REKAP DATA IKM ALAS KAKI KOTA MOJOKERTO PER KELURAHAN**

No.	Kelurahan	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.)	Kapasitas Produksi (Pasang)	Nilai Produksi (Rp.)
<b>Kecamatan Magersari</b>						
1	Balongsari	3	12	40.000.000	1.266.960	324.000.000
2	Kedundung	15	173	469.000.000	1.012.400	8.648.100.000
3	Magersari	7	59	578.000.000	760.800	3.100.200.000
4	Meri	5	15	47.500.000	178.400	1.524.400.000
5	Sentanan	1	2	12.000.000	14.400	180.000.000
6	Wates	1	5	50.000.000	7.200	125.000.000
	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>266</b>	<b>1.196.500.000</b>	<b>3.240.160</b>	<b>13.901.700.000</b>
<b>Kecamatan Prajuritkulon</b>						
1	Blooto	81	670	2.116.450.000	3.505.354	46.265.200.000
2	Kauman	1	7	65.000.000	20.000	250.000.000
3	Kranggan	23	317	1.224.600.000	1.251.750	22.749.000.000
4	Mentikan	16	137	283.500.000	445.400	4.360.000.000
5	Miji	58	734	6.724.348.000	2.208.329	66.465.238.000
6	Prajuritkulon	104	1.315	5.231.800.000	7.568.063	77.599.630.800
7	Pulorejo	10	59	117.500.000	476.702	3.987.370.000
8	Surodinawan	73	604	7.088.510.000	12.933.689	52.564.470.000
	<b>Total</b>	<b>366</b>	<b>3.843</b>	<b>22.851.708.000</b>	<b>28.409.287</b>	<b>274.240.908.800</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>398</b>	<b>4.109</b>	<b>24.048.208.000</b>	<b>31.649.447</b>	<b>288.142.608.800</b>